



**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PESISIR DAN PANTAI (P2MPP) GUNA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

**(Studi Deskriptif pada UPKu Bina Insan Bahari, Desa Kilensari, Kecamatan
Pantarukan, Kabupaten Situbondo)**

***COASTAL COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAMME
IMPLEMENTATION AND BEACH (P2MPP) TO
IMPROVE WELFARE SOCIETY***

***(A Descriptive Study on UPKu Bina Insan Bahari, Kilensari Village,
District of Panarukan, Situbondo Regency)***

SKRIPSI

Oleh

**Opan Priya Utama
NIM 100910301047**

Dosen Pembimbing

**Drs. Syech Hariyono, M.Si.
NIP 195904151989021001**

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017



**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PESISIR DAN PANTAI (P2MPP) GUNA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

**(Studi Deskriptif pada UPKu Bina Insan Bahari, Desa Kilensari, Kecamatan
Pantarukan, Kabupaten Situbondo)**

***COASTAL COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAMME
IMPLEMENTATION AND BEACH (P2MPP) TO
IMPROVE WELFARE SOCIETY***

***(A Descriptive Study on UPKu Bina Insan Bahari, Kilensari Village,
District of Panarukan, Situbondo Regency)***

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh
Opan Priya Utama
NIM 100910301047

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Muyani dan Suryono yang dengan tulus mengucurkan keringat penuh harapan kepada putra dan putri tercintanya agar mampu menjadi insan yang lebih baik.
2. Ibunda Tunjung dan Sri Rejeki M. yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, pengorbanan serta senantiasa mendoakan setiap langkah keberhasilanku.
3. Kakakku Deni Puspita Sari dan Arditya Satriawan serta adikku Gandhy Fahriar tercinta yang telah memberikan kasih sayang, dukungan dan semangat selama ini.
4. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Terimakasih telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan dan membimbingku dengan penuh kesabaran.
5. Almamaterku Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Terima kasih karena telah mengobati dahagaku akan ilmu serta memberikanku pengalaman hidup yang berharga.

MOTTO

Pelajarilah Ilmu, karena mempelajarinya karena Allah adalah khasyah,
Menuntutnya adalah ibadah, mempelajarinya adalah Tasbih, mencarinya adalah
Jihad, Mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahui adalah Shadaqah,
menyerahkan kepada ahlinya adalah Taqarrub. Ilmu adalah teman dekat dalam
kesendirian dan sahabat dalam kesunyian.

(Muadz bin Jabal ra)

The only to do great work is to love what you do.

(Steve Jobs)

*) <https://www.seniberpikir.com>

***) Dikutip dari buku "Crazy Billionaires Speak"

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Opan Priya Utama

NIM : 100910301047

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Deskriptif pada UPKu Bina Insan Bahari, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 05 Februari 2017

Yang menyatakan,



Opan Priya Utama
NIM. 100910301047

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PESISIR DAN PANTAI (P2MPP) GUNA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

(Studi Deskriptif pada UPKu Bina Insan Bahari, Desa Kilensari, Kecamatan
Pandarukan, Kabupaten Situbondo)

Oleh

Opan Priya Utama
NIM 100910301047

Pembimbing

Dosen Pembimbing : Drs. Syech Hariyono, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (*Studi Deskriptif pada UPKu Bina Insan Bahari, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo*) telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari : Senin

Tanggal : 06 Maret 2017

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

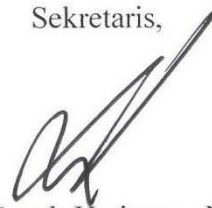
Tim Penguji:

Ketua,



Dr. Nur Dyah Gianawati, MA
NIP 195608051986031003

Sekretaris,



Drs. Syech Hariyono, M.Si
NIP 195904151989021001

Anggota I,



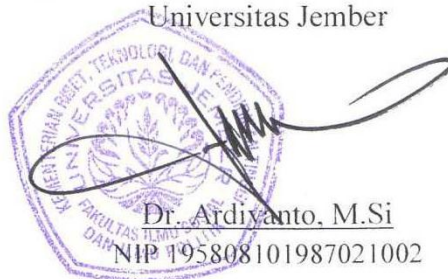
Drs. Partono, M.Si
NIP 195608051986031003

Anggota II,



Belgis H Nufus, S.Sos., M.Kesos
760014661

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember



Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Deskriptif pada UPKu Bina Insan Bahari, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo); Opan Priya Utama, 100910301047, 2017; 89 halaman; Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Sebagai Negara Bahari, Indonesia sangat kaya akan sumberdaya laut dan pesisir, tetapi masyarakat yang hidup di wilayah pesisir yang sebagian besar mata pencahariannya sebagai nelayan masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Lingkungan laut, termasuk lingkungan pesisir secara geografis berbeda dengan wilayah daratan. Perbedaan letak geografis ini akan berdampak pada perbedaan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat pesisir, maka salah satu upaya untuk memberikan kontribusi pada penanggulangan dan pengentasan kemiskinan pada masyarakat pesisir khususnya di Jawa Timur, Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur mulai Tahun 2010 telah melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) sebagai upaya untuk mengembangkan potensi di wilayah pesisir dan pantai berlandaskan budaya dan kearifan lokal. Salah satu pola pemberdayaan masyarakat yang selama ini dikembangkan adalah melalui pemberdayaan Unit Pengelolaan Keuangan dan Usaha (UPKu) sebagai instrument yang memberikan pelayanan pinjaman permodalan kepada Kelompok Masyarakat Usaha Ekonomi Produktif (Pokmas UEP). Salah satu desa yang menjadi sasaran P2MPP adalah Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Di Desa Kilensari terdapat UPKu Bina Insan Bahari selaku fasilitator P2MPP kepada masyarakat pesisir yang akan mendapatkan pelayanan pinjaman dana. Sebelum dana pinjaman diterima RTS (Rumah Tangga Sasaran) harus membentuk kelompok masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa (mudes), kemudian setiap pokmas yang dibentuk mendapatkan pinjaman dana sebesar 5jt rupiah. Dana tersebut nantinya akan dibuat untuk menunjang usaha mikro tiap kelompok maupun untuk

perbaikan alat-alat untuk melaut mereka seperti untuk perbaikan mesin, alat tangkap ikan dan sebagainya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementas Program P2MPP pada UPKu Bina Insan Bahari, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi deskriptif, penentuan informan menggunakan metode purposive, pengumpulan data dilakukan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kilensari terdapat UPKu Bina Insan Bahari yang dalam implementasinya meliputi: 1) Tahap Persiapan UPKu yaitu dimulai dengan menguatkan kapasitas kelembagaan UPKu agar berfungsi dan optimal sebagai pengelola program penanggulangan kemiskinan maupun lembaga pelayanan keuangan mikro di Desa Kilensari; 2) Sosialisasi Oleh UPKu yaitu dari pengenalan pengurus UPKu dan pengawas program P2MPP, kemudian pengenalan program P2MPP yaitu penjelasan mengenai tujuan, manfaat, dan sasaran program P2MPP. Hingga ke tahap pembentukan pokmas-pokmas selaku penerima bantuan pinjaman dana dari Program P2MPP. Terbentuklah pola-pola utama dalam program P2MPP yaitu sebelum proses pencairan dana pihak UPKu maupun Aparatur Desa harus membentuk pokmas sasaran terlebih dahulu: 3) Tahap Pengelolaan dana oleh UPKu diantaranya: a. Tahap Penyaluran Dana P2MPP. Pada tahap ini, dengan tersalurnya dana ke masyarakat melalui berbagai proses pembinaan berupa kegiatan pendampingan dan pada akhirnya pada tahap penyaluran dana P2MPP. b. Pengelolaan Unit Simpan Pinjam (USP). Pada tahap ini UPKu Bina Insan Bahari menyediakan peminjaman dana yang nantinya digunakan oleh Pokmas selaku peminjam dana untuk beberapa sektor usaha yang akan di lakukan oleh pokmas. Dalam proses peminjaman dana yang merupakan dana bergulir terdapat beberapa tahapan dan aturan peminjaman yang harus ditaati

oleh pokmas/RTS agar nantinya dana tersebut tidak macet ditengah jalan dan dapat secara terus menerus bergulir.

Kata kunci : Implementasi, Pemberdayaan Masyarakat, Program P2MPP UPKu Bina Insan Bahari.



PRAKATA

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Deskriptif pada UPKu Bina Insan Bahari, Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi serta banyak berjasa dalam proses penelitian dan penulisan hasil penelitian ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, rasa terimakasih penulis tujukan kepada:

1. Bapak Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Ibu. Dr. Nur Dyah Gianawati, MA, selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Franciscus Adi P, A.KS., M.Si dan Dra. Wahyuningsih selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis sewaktu masa studi.
4. Bapak Drs. Syech Hariyono, M.Si selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah (skripsi) yang dengan sabar membimbing, memberi arahan, nasehat, semangat serta motivasi agar penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan sangat baik.
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama masa studi penulis.

6. Seluruh Staf Akademik dan Kemahasiswaan, terima kasih atas bantuan dan kerja samanya terutama kepada mas Erwin yang telah sabar membantu kelancaran administrasi penulis.
7. Bapak Surahwi selaku Kepala Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.
8. Bapak Erfan selaku ketua UPKu “BINA INSAN BAHARI”. Terima kasih telah membantu penulis mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.
9. Sahabat di Jember, Ilham, Radit, Dedi, Singgih, Rony, Alfadili, Mardit, Luna, Anna, Gandis, Sasqia dan seluruh rekan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih untuk persahabatan, kasih sayang, dan kebersamaan kita selama ini. Kalian takkan terlupakan!
10. Teman-teman Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial (KS) angkatan 2010 seluruhnya, Terimakasih untuk semangat, dukungan, motivasi, dan masukan yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi, dan terimakasih banyak telah memberikan pengalaman-pengalaman baru selama masa studi. Kalian luar biasa!
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi khalayak umum. Penulis juga berlapang dada menerima saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan skripsi. Harapan penulis selanjutnya adalah pembaca dapat memahami apa yang telah disampaikan dan dituliskan oleh penulis dalam skripsi ini.

Jember, 11 Februari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Konsep Implementasi.....	11
2.1.1 Pengertian Implementasi.....	11
2.1.2 Tahap-tahap Implementasi	13
2.2 Pemberdayaan Masyarakat.....	18
2.2.1 Konsep Pemberdayaan	18
2.2.2 Partisipasi dalam Pemberdayaan.....	21
2.3 Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Panta (P2MPP)	23
2.3.1 Pengertian Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP).....	23
2.3.2 Tujuan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai	

(P2MPP).....	24
2.3.3 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP)	25
2.4 Hubungan Antara Ilmu Kesejahteraan Sosial Dengan Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) pada UPKu Bina Insan Bahari, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan.....	26
2.5 Tinjauan Terhadap Penelitian Terdahulu	27
2.6 Alur Pikir Konsep Penelitian	30
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Pendekatan Penelitian	34
3.2 Jenis Penelitian.....	34
3.3 Penentuan Lokasi Penelitian	35
3.4 Teknik Penentuan Informan.....	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.5.1 Observasi (Pengamatan Langsung).....	38
3.5.2 Wawancara.....	39
3.5.3 Dokumentasi	42
3.6 Teknik Analisis Data.....	43
3.7 Teknik Keabsahan Data	44
BAB 4. PEMBAHASAN	47
4.1 Gambaran Umum.....	47
4.1.1 Gambaran Umum Desa Kilensari.....	48
4.1.2 Keadaan Penduduk.....	49
4.1.3 Tingkat Pendidikan	50
4.1.4 Mata Pencaharian	51
4.1.5 Fasilitas Desa	52
4.2 Deskripsi Informan.....	52
4.2.1 Informan Pokok.....	52
4.2.2 Informan Tambahan	53
4.3 Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan	

Pantai (P2MPP) pada UPKu Bina Insan Bahari	54
4.3.1 Tahap Persiapan UPKu	58
4.3.2 Tahap Sosialisasi oleh UPKu	62
4.3.3 Tahap Pengelolaan Dana oleh UPKu	66
4.3.3.1 Penyaluran Dana P2MPP	67
4.3.3.2 Pengelolaan Unit Simpan Pinjam (USP)	71
4.3.4 Tahap Monitoring	83
BAB 5. PENUTUP	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

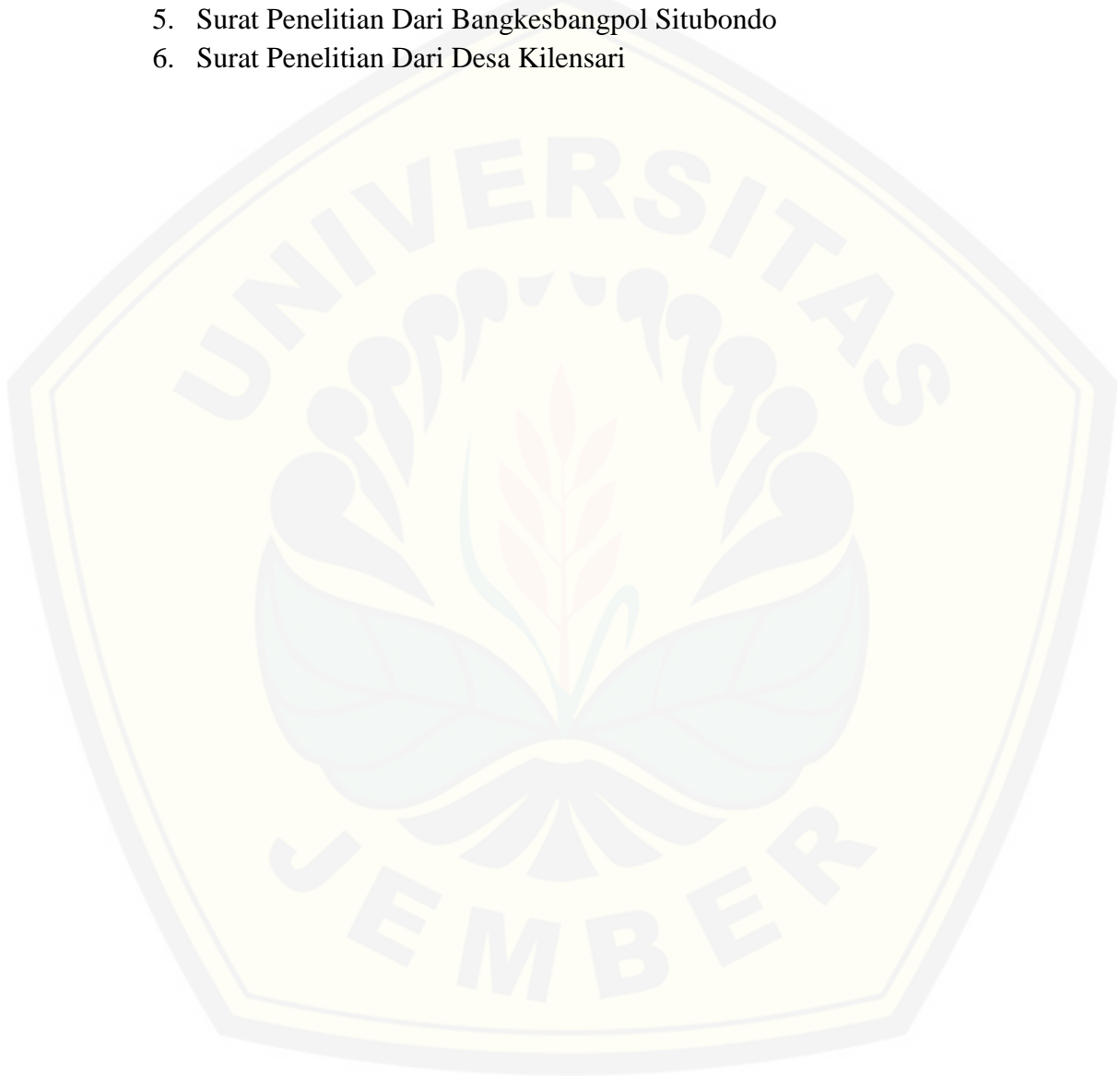
1.1	Banyaknya Keluarga Pra-Sejahtera dan Sejahtera	5
1.2	Jumlah Kelarga Pra-Sejahtera dan Sejahtera	5
3.1	<i>Teoritical Sampling</i> Penelitian.....	36
4.1	Pembagian Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	50
4.2	Jumlah Penduduk Menurut Usia Kelompok Pendidikan	50
4.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	51
4.4	Data Informan Pokok	52
4.5	Data Informan Tambahan	53
4.6	Kelompok Masyarakat Penerima Manfaat P2MPP	74

DAFTAR GAMBAR

2.1	Alur Pikir Konsep Penelitian	31
3.1	Skema Proses Analisis Data.....	44
4.1	Peta Kabupaten Situbondo	47
4.2	Kantor UPKu Bina Insan Bahari.....	56
4.3	Organisasi UPKu Bina Insan Bahari.....	57
4.4	Sosialisasi Program P2MPP.....	64
4.5	Proporsi Pembiayaan Program P2MPP.....	70
4.6	Jumlah Pinjaman Dana.....	75
4.7	Proses pembuatan kerupuk ikan oleh pokmas Kontras.....	76
4.8	Pembuatan souvenir dari kulit kerang oleh pokmas Batu Karang	77
4.9	Aktifitas memperbaiki kapal dari pokmas Calepak	78
4.10	Pokmas Ikan Gurita sedang memperbaiki jala.....	79
4.11	Informan IS yang sedang berjualan ikan.....	79
4.12	Anggota pokmas Rumput Laut yang sedang merawat rumput laut	80
4.13	Ternak kambing di kelola pokmas Iputra Bahari.....	81
4.14	Tempat sablon sederhana yang dikelola pokmas Samudra.....	82

DAFTAR LAMPIRAN

1. Foto Kegiatan Penelitian
2. Pedoman Wawancara
3. Transkrip Reduksi
4. Surat Penelitian Dari Lembaga Penelitian
5. Surat Penelitian Dari Bangkesbangpol Situbondo
6. Surat Penelitian Dari Desa Kilensari



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks. Kemiskinan sesungguhnya tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi saja, tetapi banyak aspek lain yang mempengaruhinya. Kemiskinan juga disebabkan lemahnya aspek moral, sosial, dan juga aspek budaya, serta kebijakan pembangunan yang belum merata. Logikanya, orang miskin umumnya pendapatan kecil dan tidak menentu. Pendapatan yang kecil ini disebabkan oleh kemampuan SDM-nya yang rendah, tidak memiliki modal usaha, atau tidak memiliki *networking* dalam berwirausaha. Sumberdaya alam dan lingkungan merupakan modal pembangunan yang dapat dikelola untuk menyediakan barang dan jasa (*goods & services*) bagi kemakmuran masyarakat dan bangsa. Dilihat dari potensi dan kemungkinan pengembangannya, wilayah pesisir memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional, apalagi bangsa Indonesia saat sekarang sedang mengalami krisis ekonomi.

Nilai dan arti penting pesisir dan laut bagi bangsa Indonesia dapat dilihat dari dua aspek, yaitu : Pertama, secara sosial ekonomi wilayah pesisir dan laut memiliki arti penting karena (a) sekitar 140 juta (60 %) penduduk Indonesia hidup di wilayah pesisir (dengan pertumbuhan rata-rata 2 % per tahun); (b) sebagian besar kota, baik propinsi dan kabupaten) terletak di kawasan pesisir; (c) kontribusi sektor kelautan terhadap PDB nasional dan (d) industri kelautan (*coastal industries*) menyerap lebih dari 16 juta tenaga kerja secara langsung. Kedua, secara biofisik, wilayah pesisir dan laut Indonesia memiliki arti penting karena (a) Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada, yaitu sekitar 81.000 km (13,9 % dari panjang pantai dunia) dan ; (b) sekitar 75 % dari wilayahnya merupakan wilayah perairan sekitar 5,8 juta km² termasuk ZEEI; (c) Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sekitar 17.508 pulau dan (d) Dalam wilayah tersebut terkandung potensi kekayaan dan keanekaragaman sumberdaya alamnya yang terdiri atas potensi sumberdaya alam pulih seperti perikanan, ekosistem mangrove, ekosistem terumbu karang

maupun potensi sumberdaya alam tidak pulih seperti migas, mineral atau bahan tambang lainnya serta jasa-jasa lingkungan.

Sumber://https://karakteristik_masyarakat_pesisir (Diakses 15 Juni 2015)

Masyarakat pesisir itu sendiri merupakan sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama yang mendiami suatu wilayah pesisir, membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut. Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal dan hidup di wilayah pesisiran. Wilayah ini adalah wilayah transisi yang menandai tempat perpindahan antara wilayah daratan dan laut atau sebaliknya (Dahuri, Rokhmin. 2001:5).

Tentu masyarakat pesisir tidak hanya nelayan, melainkan juga pembudidaya ikan, pengolah ikan bahkan pedagang ikan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk provinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu (kewenangan provinsi) untuk kabupaten dan ke arah darat batas administrasi kabupaten. Wilayah pesisir dan pantai Jawa Timur mempunyai potensi sumberdaya alam yang cukup beragam, diantaranya potensi perikanan tangkap, budidaya tambak, industri pengolahan ikan, pertanian, perkebunan, peternakan dan wisata pantai. Dalam suatu wilayah pesisir bisa mempunyai potensi alam yang beragam tersebut.

Sebagai salah satu upaya untuk memberikan kontribusi pada penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Jawa Timur, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur mulai Tahun 2010 telah melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP), yang dialokasikan pada 8 Kabupaten, 8 desa pesisir di Jawa Timur. Delapan tempat pelaksanaan program tersebut ialah 1) Kabupaten Malang, Kecamatan Bantur, Desa Sumberbening, 2) Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Paiton, Desa Jabungsisir, 3) Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Rejos, Desa Jarangan, 4) Kabupaten Tranggalek, Kecamatan Watulimo, Desa Tasikmadu, 5)

Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Kalidawir, Desa Kalibatur, 6) Kabupaten Tuban, Kecamatan Bancar, Desa Boncong, 7) Kabupaten Situbondo, Kecamatan Panarukan, Desa Kilensari, 8) Kabupaten Sampang, Kecamatan Ketapang, Desa Ketapang Daya. www.bapemas.jatimprov.go.id (Diakses 21 Juni 2015)

Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembangkan potensi di wilayah pesisir dan pantai berlandaskan budaya dan kearifan lokal. Disamping itu, melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan proganggulan kemiskinan secara profesional dan berkelanjutan sehingga dapat mengembangkan pola-pola baru yang inovatif untuk penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai dikelola secara terpadu dengan membuka ruang partisipasi antar *stakeholders* dalam rangka memfasilitasi pemberdayaan RTM (Rumah Tangga Miskin) maupun pengembangan perekonomian di wilayah pesisir dan pantai. Dalam implementasinya, peran serta Perguruan Tinggi (PT) yang memiliki pengalaman dibidang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi sumberdaya, diperlukan sebagai fasilitator dan mediator bagi pengembangan akses dan kerjasama dalam mengembangkan potensi pesisir dan pantai untuk kesejahteraan masyarakat.

Salah satu pola pemberdayaan masyarakat yang selama ini dikembangkan adalah melalui pemberdayaan Unit Pengelolaan Keuangan dan Usaha (UPKu) sebagai instrument yang memberikan pelayanan pinjaman permodalan kepada Kelompok Masyarakat Usaha Ekonomi Produktif (Pokmas UEP). UPKu dalam hal ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan permodalan baik pada kelompok maupun RTM secara perorangan yang akan memulai maupun melanjutkan usahanya dalam rangka peningkatan pendapatan (*income generating*).

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai mempunyai prioritas program yang berkaitan dengan pembangunan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target, khususnya dibidang perekonomian masyarakat perdesaan, dengan mengacu pada potensi dan permasalahan yang ada di wilayah pesisir dan pantai dengan mengusung prinsip

pada pembangunan manusia, keberpihakan terhadap orang miskin, transparansi, partisipasi, kompetisi sehat, desentralisasi, akuntabilitas dan mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam yang lestari & berkelanjutan. Penetapan lokasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan mempertimbangkan persyaratan, antara lain :

1. Usulan lokasi dari Pemerintah Kabupaten.
2. Desa Lokasi yang diusulkan memiliki potensi sumberdaya alam yang dapat diandalkan yaitu potensi perikanan, potensi pariwisata, potensi transportasi laut dan potensi wilayah pesisir lainnya.
3. Ada kesiapan dukungan dalam bentuk dana penyertaan (dana sharing) dari Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Desa berupa ruang/tempat sekretariat UPKu (Unit Pengelola Keuangan dan Usaha).
4. Adanya respon positif dari Pemerintah Desa terhadap program.

Desa pesisir merupakan entitas sosial, ekonomi, ekologi dan budaya, yang menjadi batas antara daratan dan lautan, di mana di dalamnya terdapat suatu kumpulan manusia yang memiliki pola hidup dan tingkah laku serta karakteristik tertentu. Masyarakat pesisir ini menjadi tuan rumah di wilayah pesisir sendiri. Mereka menjadi pelaku utama dalam pembangunan kelautan dan perikanan, serta pembentuk suatu budaya dalam kehidupan masyarakat pesisir. Banyak diantaranya faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat pesisir menjadi suatu komunitas yang terbelakang atau bahkan terisolasi sehingga masih jauh untuk menjadikan semua masyarakat setempat sejahtera. Sebagian besar desa yang mendapat program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) yaitu desa yang sebagian besar masyarakatnya berada di garis kemiskinan. Terdapat beberapa aspek yang menyebabkan terpeliharanya kemiskinan nelayan atau masyarakat pinggiran pantai, diantaranya kebijakan pemerintah yang tidak memihak masyarakat miskin, banyak kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan bersifat *top down* dan selalu menjadikan masyarakat sebagai objek, bukan subjek. Kondisi bergantung pada musim sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan nelayan, terkadang beberapa pekan nelayan tidak melaut

dikarenakan musim yang tidak menentu. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan peralatan yang digunakan nelayan berpengaruh pada cara dalam menangkap ikan, keterbatasan dalam pemahaman akan teknologi, menjadikan kualitas dan kuantitas tangkapan tidak mengalami perbaikan.

Tabel 1.1 Banyaknya Keluarga Pra-Sejahtera dan Sejahtera
Number of Pre-Prosperous and Prosperou Family
2015

No.	Kecamatan	Keluarga Pra-Sejahtera	Keluarga Sejahtera	Jumlah
1	Panarukan	3368	895	4263
2	Besuki	2299	4274	6573
3	Situbondo	1560	3089	4649

Sumber : Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo

Pada tabel 1.1 dapat dilihat banyaknya keluarga prasejahtera di kecamatan Panarukan menempati jumlah terbanyak sebesar 3368 jiwa sedangkan keluarga sejahtera hanya 895 jiwa. Data pada tabel 1.1 tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Panarukan termasuk kecamatan yang kurang sejahtera atau tertinggal daripada Kecamatan Besuki dan Kecamatan Situbondo sehingga P2MPP diberikan pada Desa Kilensari yang ada di kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

Tabel 1.2 Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera
2015

No.	Desa	Pra Sejahtera	Sejahtera	Jumlah
1	Kilensari	738	270	1008
2	Paowan	499	93	592
3	Wringinanom	395	124	519

Sumber : PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) Kecamatan

Dari tabel 1.2 dapat dilihat banyaknya keluarga prasejahtera di Desa Kilensari menempati jumlah terbanyak sebesar 738 jiwa dan keluarga sejahtera sebesar 270 jiwa padahal Desa Kilensari merupakan desa yang paling banyak penduduknya sebanyak 1008 jiwa diantara desa lain yang ada di Kecamatan Panarukan. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Desa Kilensari dapat dikatakan sebagai desa yang berada di garis kemiskinan lebih tinggi daripada desa lain yang ada di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Salah satu Desa di Kabupaten Situbondo yang mendapat Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan

Pantai (P2MPP) adalah Desa Kilensari. Desa Kilensari Kecamatan Panarukan merupakan salah satu desa yang masyarakatnya sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan. Sasaran dari program P2MPP yaitu masyarakat pesisir namun, lebih difokuskan pada nelayan karena mayoritas masyarakat pesisir bermata pencaharian sebagai nelayan.

Kondisi lain yang turut berkontribusi memperburuk tingkat kesejahteraan nelayan adalah mengenai kebiasaan atau pola hidup. Tidak pantas jika kita menyebutkan nelayan pemalas, karena jika dilihat dari daur hidup nelayan yang selalu bekerja keras. Namun kendalanya adalah pola hidup konsumtif, dimana pada saat penghasilan banyak, tidak ditabung untuk persiapan paceklik, melainkan dijadikan kesempatan untuk membeli kebutuhan sekunder. Namun ketika paceklik, pada akhirnya berhutang, termasuk kepada lintah darat, yang justru semakin memperberat kondisi. Deskripsi diatas merupakan pusan masalah yang terjadi pada masyarakat nelayan umumnya di Indonesia.

Berdasarkan observasi, di Desa Kilensari masih dianggap sebagai desa yang kumuh karena lokasinya yang berdekatan dengan pantai, serta terdapat rumah penduduk dipinggir pantai yang menyebabkan sampah berserakan di sekitar pinggir pantai hingga membuat pemandangan tidak nyaman. Masyarakat yang biasa hidup dengan mencuci atau mandi di sumur dan sungai sekitar pantai dapat membuat aliran sungai kotor yang dapat menjadi sarang penyakit. Suasana sekitar pantai yang masih belum sepenuhnya dikelola dengan baik harus diterapkan suatu peraturan agar masyarakat pesisir dapat hidup tertib, bersih dan memanfaatkan dengan baik sumber daya pantai yang ada. Dengan adanya peraturan dari pemerintah yaitu P2MPP diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik, meningkatkan kualitas hasil nelayan dan tambak karna P2MPP fungsinya adalah untuk mengembangkan potensi di wilayah pesisir dan pantai berlandaskan budaya dan kearifan lokal. Disamping itu, melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan program penanggulangan kemiskinan secara profesional dan berkelanjutan sehingga dapat mengembangkan pola-pola baru yang inovatif untuk penanggulangan kemiskinan.

Peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh pemerintah semakin bertambah dan melibatkan banyak kreasi organisasi atau kelembagaan baru untuk pengelolaan sumberdaya alam yang diyakini akan memberikan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sumberdaya pesisir dan laut dalam menunjang kehidupan, meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga mampu berperan serta dalam setiap tahapan pengelolaan secara terpadu, serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan bentuk-bentuk pemanfaatan yang lestari dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Namun dalam perkembangannya, program-program yang dibuat oleh pemerintah masih kurang berjalan dengan baik. Kendala sosialisasi program utamanya adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti sosialisasi program yang mengakibatkan proses pelaksanaan program menjadi tersendat. Minimnya partisipasi masyarakat tersebut diduga penyebabnya adalah “rasa memiliki” yang rendah terhadap program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Berbeda halnya dengan sistem pengelolaan berdasarkan kearifan lokal atau berbasis tradisi (kelembagaan lokal). Nilai-nilai kearifan yang sudah tumbuh dari masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun, membuat masyarakat turut berpartisipasi secara aktif dalam menjaga berbagai peraturan yang ada di dalamnya. Sehingga dengan adanya UPKu Bina Insan Bahari diharapkan mampu menjadi fasilitator bagi masyarakat di Desa Kilensari untuk mengembangkan usaha dan memaksimalkan sumber daya alam yang ada di Desa Kilensari karena UPKu merupakan salah satu penentu keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program P2MPP di tingkat masyarakat. Hal ini karena UPKu yang langsung berhubungan dengan masyarakat yang menjadi sasaran program atau kelompok masyarakat penerima manfaat, sehingga keberhasilan atau kegagalan usaha kelompok masyarakat penerima manfaat salah satunya karena faktor UPKu.

Konsep pemberdayaan masyarakat pesisir pantai yang dimaksud dalam tulisan ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh UPKu Bina Insan Bahari dan pemerintah di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai (P2MPP) serta adanya pembinaan terhadap masyarakat pesisir pantai di desa tersebut dengan mengkaji bagaimana proses pemberdayaan masyarakat melalui program tersebut, manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat setempat beserta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi menarik untuk di teliti sebagai bahan kajian dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan dalam pembangunan khususnya pembangunan yang berdimensi kerakyatan dimana hasil akhirnya yaitu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul “Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” (Studi Deskriptif Pada UPKu Bina Insan Bahari Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo).

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Nawawi (2003:40) masalah muncul karena tidak terdapatnya keseimbangan antara sesuatu yang diharapkan (das sollen) berdasarkan teori-teori hukum-hukum yang menjadi tolak ukur dengan kenyataan (das sein) sehingga menimbulkan pertanyaan mengapa demikian atau apa sebabnya demikian. Definisi masalah penelitian menurut Martono (2011:27) merupakan fenomena atau gejala (sosial) yang tidak dikehendaki keberadaanya atau tidak seharusnya terjadi, fenomena atau gejala yang mengandung pertanyaan dan perlu jawaban.

Berangkat dari fenomena tentang masalah penelitian tersebut, peneliti menemukan sebuah persoalan terkait Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP). Permasalahan tersebut kemudian diterjemahkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi

Deskriptif Pada UPKu Bina Insan Bahari, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo)

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran dan penjelasan atas target yang ingin dicapai oleh peneliti dalam proses penelitian. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada UPKu Bina Insan Bahari, di Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, baik secara teoritis maupu secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademik

Menjadi bahan referensi tambahan dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu kesejahteraan sosial, terutama yang berkenaan dengan Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP).

2. Bagi Instansi

Bagi instansi terkait, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai masukan dalam pengambilan kebijaksanaan terkait dengan pemberdayaan masyarakat pesisir, sekaligus sebagai sumbangan pikiran terhadap masalah-masalah yang timbul dalam Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai.

3. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk memberikan data dan informasi bahan studi dalam melakukan penelitian, serta digunakan sebagai sarana pembandingan bagi penelitian-penelitian yang telah maupun yang akan dilakukan.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam objek penelitian diperlukan adanya landasan teori yang sangat luas dan kuat berupa konsep-konsep atau teori-teori sehingga mampu mendeskripsikan atau menjelaskan suatu realitas sosial. Snelbecker dalam Moleong (2000:34) mengemukakan bahwa dalam mendefinisikan teori, proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu mengikuti aturan tertentu sehingga dapat dihubungkan secara logis satu dengan yang lainnya dengan dasar-dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati, sehingga landasan teori tersebut sebagai acuan untuk menggambarkan dan mendapatkan teori-teori yang relevan secara berkaitan dengan teori yang ada. Intinya berusaha membantu penulis dalam dalam menjelaskan hubungan dua konsep atau lebih dalam variabel suatu penelitian, hal tersebut untuk menghindari terjadinya publikasi teori-teori yang tidak diinginkan.

2.1 Konsep Implementasi

2.1.1 Pengertian Implementasi

Parsons (2008:472), menjelaskan bahwa implementasi yang efektif adalah sebuah kondisi yang dapat dibangun dari pengetahuan dan pengalaman dari orang-orang yang ada di garis depan pemberi layanan. Sedangkan Meier dan Horn dalam Parsons (2008:482), menyatakan bahwa studi implementasi mempertimbangkan isu (content) atau tipe kebijakan. Artinya bahwa dalam melaksanakan dan menjalankan implementasi suatu program harus melihat dan memperhatikan kondisi lapangan agar sejalan dengan isi dari suatu program yang ditujukan untuk pelayanan masyarakat agar hasil dapat secara merata dirasakan oleh masyarakat.

Syukur Abdullah (1987:9) mengemukakan definisi implementasi sebagai berikut:

“Implementasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah sebuah rencana dan kebijakan diterapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan. Langkah-langkah strategis maupun

operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dan program yang ditetapkan semula.”

Dari definisi di atas menunjukkan bahwa implementasi atau pelaksanaan merupakan aspek operasional dan rencana atau penempatan berbagai program yang telah disusun sebelumnya, mulai dari penetapan sampai hasil akhir yang dicapai sebagai tujuan semula. Lebih lanjut, beliau mengemukakan bahwa didalam mengimplementasikan atau melaksanakan suatu program yang dipandang sebagai suatu proses. Ada tiga unsur utama dalam pelaksanaan yaitu:

1. Adanya program yang dapat menjadi ukuran utama dalam melaksanakan kegiatan.
2. Target grup yaitu kelompok yang menjadi sasaran daripada program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah.
3. Serta unsur-unsur pelaksana yaitu pihak mana yang terlibat dalam pelaksanaan program yang dibuat.

Faktor pelaksanaan menempati posisi yang paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu program untuk diwujudkan. Maka dalam proses kegiatannya menurut Bintoro (1991:199) perlu memerhatikan beberapa hal, antara lain:

1. Perlu ditentukan secara jelas siapa atau badan/lembaga mana secara fungsional akan disertai wewenang mengkoordinasikan program didalam suatu sektor.
2. Perlu diperhatikan penyusunan program pelaksanaan yang baik dan jelas. Dalam program pelaksanaan itu, dasar prinsip fungsional perlu dituangkan kedalam rangkaian prosedur yang serasi, jelas dan di taati oleh semua pihak yang terlibat dalam hubungan pelaksanaan program tersebut.
3. Perlu dikembangkan hubungan kerja yang lebih baik, antara lain dalam bentuk badan kerjasama atau suatu panitia kerjasama dengan tanggung jawab dan koordinasi yang jelas.

4. Perlu diusahakan koordinasi melalui proses penyusunan anggaran pelaksanaan pembiayaannya.

Bertolak dari rumusan di atas maka dapat diambil sebuah kesimpulan, bahwa pelaksanaan itu adalah suatu kegiatan dalam proses merealisasikan suatu program dengan melalui prosedur dan tat cara yang dianggap tepat. Selanjutnya perlu ditegaskan hendaknya suatu pelaksanaan harus dapat dipertanggung jawabkan. Ada beberapa segi berpengaruh diantaranya adalah pelaksanaan itu sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Seperti yang dikemukakan Bintoro (1991:219), “suatu segi lain dari dapatnya dipertanggungjawabkan suatu pelaksanaan pemerintah adalah apakah pelaksanaannya itu sesuai dengan kepentingan masyarakat”. Dengan demikian pelaksanaan sebagai suatu kegiatan untuk merealisasikan tujuan terhadap sebuah sasaran sehingga suatu pelaksanaan akan mengarah kepada usaha yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Pada dasarnya implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan dari suatu program atau kegiatan pada suatu institusi. Dalam hal ini implementasi yang dimaksud adalah pelaksanaan atau penerapan program pemberdayaan masyarakat pesisir dan pantai (P2MPP) guna mensejahterakan masyarakat yang ada di Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo.

2.1.2 Tahap-tahap Implementasi

Tahapan implementasi menurut Rendall B. Ripley dalam Soenarko (2000:250) melalui enam langkah sebagai berikut:

1. Persiapan

Sebelum dilaksanakannya program terlebih dahulu adanya persiapan pengkajian program untuk mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan dan diperlukan ketika program akan dilaksanakan dengan menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas.

2. Pengembangan kontak dengan komunitas

Tahapan ini sebagai upaya pengembangan relasi dengan komunitas yang lebih bermakna. Pengembangan kontak yang baik dengan berbagai pihak untuk mempercepat dan mempermudah penyampaian tujuan program.

3. Pengumpulan data dan informasi

Pengumpulan data dilakukan dalam rangka untuk memperoleh data dan informasi dari pihak yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas dimana menggambarkan secara umum yang terkait dengan subjek pembahasan.

4. Perencanaan dan analisis

Menganalisis dan mengkaji pokok permasalahan yang akan dibahas dimana melakukan perencanaan dalam memilih tindakan tindakan yang akan dilakukan untuk memfokuskan pada masalah tertentu.

5. Pelaksanaan

Masing-masing pihak yang terkait melaksanakan kegiatan program dalam rangka mencapai keberhasilan program dengan mengikuti segala ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam program yang telah ditetapkan.

6. Evaluasi

Dengan evaluasi maka suatu program dapat diketahui kelemahan dan kekurangan sejak direncanakan sampai pada pelaksanaan suatu kegiatan atau program untuk mencapai tujuan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Di pihak lain, untuk mengimplementasikan program, secara rinci tahapan-tahapan implementasi menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn dalam Wahab (2004:36) sebagai berikut:

Tahapan I terdiri atas kegiatan-kegiatan:

- a. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan suatu tujuan secara jelas.
- b. Menentukan standar pelaksanaan.
- c. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.

Tahapan II merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumberdaya, prosedur, biaya serta metode.

- a. Menentukan jadwal.
- b. Melakukan pemantauan.
- c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program.

Suatu proses implementasi dalam kenyataan yang sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil maupun gagal sama sekali ditinjau dari hasil yang dicapai, karena dalam poses tersebut turut bermain dan terlibat berbagai unsure yang pengaruhnya dapat bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran program (Abdullah, 1987). Berhasil atau terhambatnya suatu proses implementasi karena ada faktor-faktor atau unsur-unsur yang mempengaruhinya. Sebagaimana yang di kemukakan oleh Edwards III (dalam Nawawi, 2009), bahwa berhasil atau terhambatnya suatu proses implementasi dipengaruhi oleh empat factor yaitu;

- a) Komunikasi;
- b) Sumber Daya (*resource*);
- c) Sikap Birokrasi dan Pelaksana;
- d) Faktor Struktur Birokrasi.

Hal tersebut diatas berbeda dengan pendapat Warwick seperti yang dikutip oleh Abdullah, (1987:17) bahwa dalam tahap implementasi berbagai kekuatan akan berpengaruh, baik faktor yang mendorong maupun yang menghambat.

Faktor – faktor yang mendorong menurut Warrick terdiri dari :

- a) Komitmen pimpinan politik;
- b) Kemampuan organisasi;
- c) Komitmen para pelaksana (*implementer*);
- d) Dukungan dari kelompok kepentingan (*interest group support*).

Sedangkan faktor – faktor yang menjadi penghambat adalah sebagaiberikut :

- a) Banyak pemain (*actors*);
- b) Terdapatnya komitmen atau loyaltas ganda;
- c) Kerumitan yang melekat pada proyek itu sendiri;
- d) Jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak;
- e) Faktor lain; waktu dan perubahan pimpinan.

Selanjutnya Grindle (1980:7) mengemukakan bahwa proses implementasi baru mulai apabila tujuan – tujuan dan sasaran telah ditetapkan dan telah tersusun, dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran tersebut. Jadi berdasarkan pendapat ahli tersebut diatas, penulis berkesimpulan bahwa suatu proses implementasi baru dapat dimulai apabila terdapat unsur – unsure sebagai berikut :

- a) Adanya program yang akan dilaksanakan;
- b) Sasaran program;
- c) Dana yang teralokasi; dan
- d) Pelaksana (implementer) program.

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli di atas, disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana pemberdayaan masyarakat dengan harapan ingin memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu program itu sendiri. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penelitian ini adalah membuat Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (P2MPP) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akan tetapi dalam membuat program juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah program tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi target sasaran. Hal tersebut bertujuan agar suatu program tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Jadi dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa implementasi program akan selalu berkaitan dengan tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan dan tahapan pengawasan seperti yang diterapkan dalam Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (P2MPP) yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat terutama masyarakat pesisir yang menjadi sasaran dari program tersebut. Berdasarkan pengertian implementasi program dan tahapan-tahapan implementasi yang telah dijelaskan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi program adalah sebagai suatu proses atau alur program yang berfokus pada tahapan perencanaan, pelaksanaan

dan tahapan pengawasan program yaitu berupa program pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Kilensari.

Desa Kilensari Kecamatan Panarukan merupakan salah satu desa yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Situbondo yang mendapatkan dana Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) dimana P2MPP adalah salah satu program pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan. Program ini memang tidak jauh berbeda dengan program lainnya, terutama dalam segi pelaksanaannya. Pelaksanaan program ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap perencanaan dan sosialisasi, serta tahap pengelolaan dana P2MPP. Pelaksanaan P2MPP ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang bertugas dalam pelaksanaannya. Dari data yang didapat tugas-tugas dari pihak yang berwenang sudah jelas, hal ini mempermudah jalannya pelaksanaan program karena adanya kejelasan tugas dan wewenang tersebut. Pemeriksaan desa sasaran yaitu Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Pemeriksaan ulang kelurahan adalah suatu kegiatan penilaian kembali sasaran-sasaran P2MPP untuk menentukan apakah desa tersebut memang sesuai, dengan kriteria lokasi sasaran P2MPP. Dasar penetapan lain mengapa lokasi ini adalah tingginya dinamika masyarakat pesisir dengan adanya pelabuhan perikanan dan sarana pendukung penangkapan ikan lainnya dengan kata lain, Desa Panarukan memiliki potensi sumberdaya pesisir dan laut untuk dikembangkan.

Kegiatan sosialisasi P2MPP dimaksudkan agar tertanam suatu pengertian dan kesadaran masyarakat untuk aktif berpartisipasi baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini diperlukan agar masyarakat mendapatkan pengetahuan dan informasi yang jelas benar dan tepat mengenai tujuan dan sasaran program, sehingga dapat memahami dan mampu melaksanakan program dengan penuh tanggung jawab. Selain itu upaya sosialisasi juga diperlukan untuk menciptakan kondisi yang mendukung terlaksananya program secara lancar dan dapat membuahkan hasil sesuai dengan yang diharapkan, serta dapat berkelanjutan.

2.2 Pemberdayaan Masyarakat

2.2.1 Konsep Pemberdayaan

Menurut Sumpeno (2011:19) pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Sedangkan, Abdur Rohim (2013), menyatakan dan memberikan gambaran konsep pemberdayaan masyarakat secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment) berasal dari kata “power” yang berarti kekuasaan atau keberdayaan (mengutip pendapat Edi Suharto, 2009).

Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok). Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu “senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung menilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif (Friedman, 1993:124).

Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi di dalam kelompoknya masing-masing, yaitu individu dalam kelompok belajar untuk mendeskripsikan opini dan emosi mereka atau dengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah menganalisis, kemudian mencari solusinya.

Proses-proses pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut (Soetomo, 2006:258):

- a. *Getting to know the local community*: Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui artinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara petugas dengan masyarakat.
- b. *Gathering knowledge about the local community*: Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, sex, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual dan custom,

jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal.

- c. *Identifying the local leader*: Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia apabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinan/tokoh-tokoh masyarakat setempat. Untuk itu, faktor “*the local leaders*” harus selalu diperhitungkan karena mereka mempunyai pengaruh yang kuat didalam masyarakat.
- d. *Stimulating the community to realize that it has problem*: Di dalam masyarakat yang terikat terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu, masyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.
- e. *Helping people to discuss their problem*: Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.
- f. *Helping people to identify their most pressing problems*: Masyarakat perlu diperdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang paling menekan. Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakan pemecahannya.
- g. *Fostering self-confidence*: Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. Rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya.
- h. *Deciding on a program action*: Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program action tersebut perlu ditetapkan menurut skala prioritas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukan pelaksanaannya.
- i. *Recognition of strengths and resources*: memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhannya.
- j. *Helping people to continue to work on solving their problems*: Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan. Karena itu, masyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnya secara kontinyu.
- k. *Increasing people is ability for self-help*: Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri. Untuk itu, perlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadaya.

Ide menempatkan manusia lebih sebagai subjek dari dunianya sendiri mendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (*empowerment*). Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan

yang menekan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung kemandirian mereka melalui organisasi. Kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan dan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Kartasasmita (1995:139) mengemukakan bahwa upaya memberdayakan masyarakat harus dilakukan melalui tiga cara:

- a. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) daya yang dapat dikembangkan, sehingga pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
- b. Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana baik fisik (irigasi, jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat lapisan bawah. Terbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya, seperti tersedianya lembaga pendanaan, pelatihan dan pemasaran di pedesaan.
- c. Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan menghadap yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

Beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat pada intinya ialah meningkatkan kemampuan masyarakat dan memandirikan masyarakat jadi masyarakat harus berusaha mengembangkan potensi yang dimilikinya agar bisa lepas dari kemiskinan dan keterbelakangan. P2MPP merupakan program yang menggunakan strategi pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan tersebut menempatkan masyarakat sebagai subjek

yang mandiri yang berperan serta dan terlibat secara langsung dalam kegiatan pembangunan.

2.2.2 Partisipasi dalam Pemberdayaan

Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemadirian dan proses pemberdayaan (Craig dan May, 1995 dalam Hikmat, 2004). Lebih lanjut Hikmat (2004) menjelaskan pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya. Proses ini, pada akhirnya akan dapat menciptakan pembangunan yang berpusat pada rakyat. Sedangkan menurut Fithriadi, dkk. (1997:71) Partisipasi adalah pokok utama dalam pendekatan pembangunan yang terpusat pada masyarakat dan berkesinambungan serta merupakan proses interaktif yang berkelanjutan.

Prinsip dalam partisipasi adalah melibatkan atau peran serta masyarakat secara langsung, dan hanya mungkin dicapai jika masyarakat sendiri ikut ambil bagian, sejak dari awal, proses dan perumusan hasil. Keterlibatan masyarakat akan menjadi penjamin bagi suatu proses yang baik dan benar. Dengan demikian, Abe (2005) mengasumsikan bahwa hal ini menyebabkan masyarakat telah terlatih secara baik. Tanpa adanya pra kondisi, dalam arti mengembangkan pendidikan politik maka keterlibatan masyarakat secara langsung tidak akan memberikan banyak arti. Lebih lanjut Abe (2005) mengemukakan, melibatkan masyarakat secara langsung akan membawa dampak penting, yaitu : (1) Terhindar dari peluang terjadinya manipulasi. Keterlibatan masyarakat akan memperjelas apa yang sebenarnya dikehendaki oleh masyarakat; (2) Memberikan nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan karena semakin banyak jumlah mereka yang terlibatkan semakin baik; dan (3) Meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.

Pada dasarnya pembangunan desa merupakan tanggung jawab bersama antar pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat menjadi sasaran sekaligus pelaku pembangunan. Keterlibatan masyarakat pesisir di Desa Kilensari

pada setiap tahapan-tahapan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir dan pantai (P2MPP) di Desa Kilensari, merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Kegagalan berbagai program pembangunan perdesaan di masa lalu adalah disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan tidak melibatkan masyarakat. Diharapkan dalam pelaksanaan program tersebut masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program P2MPP agar nantinya dapat mensejahterakan masyarakat yang ada di Desa Kilensari.

2.3 Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP)

2.3.1 Pengertian Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP)

Sebagai salah satu upaya untuk memberikan kontribusi pada penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Jawa Timur, Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur mulai Tahun 2010 telah melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP), yang dialokasikan pada 8 Kabupaten, 8 desa pesisir di Jawa Timur. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembangkan potensi di wilayah pesisir dan pantai berlandaskan budaya dan kearifan lokal. Melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan program penanggulangan kemiskinan secara profesional dan berkelanjutan sehingga dapat mengembangkan pola-pola baru yang inovatif untuk penanggulangan kemiskinan.

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai dikelola secara terpadu dengan membuka ruang partisipasi antar *stakeholders* dalam rangka memfasilitasi pemberdayaan RTM maupun pengembangan perekonomian di wilayah pesisir dan pantai. Dalam implementasinya, peran serta Perguruan Tinggi (PT) yang memiliki pengalaman dibidang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi sumberdaya, diperlukan sebagai fasilitator dan mediator bagi pengembangan

akses dan kerjasama dalam mengembangkan potensi pesisir dan pantai untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai mempunyai prioritas program yang berkaitan dengan pembangunan kualitas sumberdaya manusia, khususnya dibidang perekonomian masyarakat perdesaan, dengan mengacu pada potensi dan permasalahan yang ada diwilayah pesisir dan pantai dengan mengusung prinsip pada pembangunan manusia, keberpihakan terhadap orang miskin, transparansi, partisipasi, kompetisi sehat, desentralisasi, akuntabilitas dan mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam yang lestari & berkelanjutan.

- Sistem Kekerabatan

Hubungan-hubungan sosial antar kerabat dalam masyarakat pesisir masih cukup kuat. Perbedaan status sosial ekonomi yang mencolok antar kerabat tidak dapat menjadi penghalang terciptanya hubungan sosial yang akrab di antara mereka.

- Ekonomi Lokal

Sumber daya laut adalah potensi utama yang mengerakan kegiatan perekonomian desa. Secara umum kegiatan perekonomian tinggi-rendahnya produktivitas perikanan. Jika produktivitas tinggi, tingkat penghasilan nelayan akan meningkat sehingga daya beli masyarakat yang semakin besar nelayan juga akan meningkat. Sebaliknya, jika produktivitas rendah, tingkat penghasilannya nelayan akan menurun sehingga tingkat daya beli masyarakat rendah. Kondisi demikian sangat mempengaruhi kuat lemahnya kegiatan perekonomian desa. www.bapemas.jatimprov.go.id (Diakses 21 Juni 2015)

Dari penjelasan tentang pengertian P2MPP diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian P2MPP program penanggulangan kemiskinan yang dicanangkan oleh pemerintah untuk rakyat sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dibawah naungan Bapemas dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas hidup masyarakat dan memecahkan berbagai masalah yang timbul di masyarakat baik individu maupun kelompok.

2.3.2 Tujuan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP)

Tujuan P2MPP adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan kesempatan kerja untuk masyarakat miskin di wilayah pesisir dengan menggunakan pendekatan-pendekatan partisipasi aktif dari masyarakat, serta mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pengembangan pembangunan. Adapun tujuan umum dan tujuan khusus dari pelaksanaan P2MPP yaitu:

a. Tujuan Umum

Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera, serta memperkuat institusi lokal di wilayah pesisir dan pantai berlandaskan budaya dan kearifan lokal.

b. Tujuan Khusus

- 1) Melakukan perubahan sikap perilaku (soft skill) berupa motivasi untuk bekerja keras, disiplin terhadap diri sendiri dan bertanggungjawab.
- 2) Membentuk kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai yang dilandasi oleh budaya dan kearifan lokal sebagai mitra Pemerintah dan stakeholders lainnya dalam pembangunan wilayah pesisir.
- 3) Meningkatkan peran masyarakat dan stakeholders untuk pengambilan keputusan pembangunan di wilayahnya dalam wadah kelembagaan pemberdayaan pesisir dan pantai.
- 4) Meningkatkan perekonomian di wilayah pesisir dan pantai berbasis komunitas dan potensi lokal.
- 5) Penguatan permodalan usaha mikro dan pokmas di wilayah pesisir dan pantai.
- 6) Meningkatkan peran dan partisipasi gender dalam ekonomi rumah tangga dan kegiatan pembangunan.
- 7) Menjaga kerusakan lingkungan wilayah pesisir dan pantai melalui kegiatan konservasi, yang berdampak terhadap tumbuhnya wisata alam dan lapangan kerja baru berlandaskan budaya dan kearifan lokal.

2.3.3 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP)

Pengendalian P2MPP dilakukan melalui kegiatan tahap pelaksanaan yang meliputi pihak-pihak terkait dan proses pelaksanaan kegiatan dalam P2MPP serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program P2MPP. Pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh proses dan kegiatan program P2MPP ini bertujuan untuk menjaga setiap proses setiap proses pelaksanaannya program tersebut agar sesuai dengan aturan, prinsip, dan kebijakan P2MPP serta mengendalikan agar setiap pelaku dan sasaran dari program P2MPP dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dalam konsep ini yang menjadi pelaku utamanya adalah pihak-pihak terkait dalam program P2MPP yang berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan pembina agar tujuan dan mekanisme program P2MPP dapat terealisasi dengan baik dan benar serta masyarakat pesisir yang menjadi sasaran program, dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai terciptanya masyarakat pesisir yang mandiri, lebih modern, serta dapat memanfaatkan SDA dan SDM secara lebih maksimal. Dengan demikian tahapan implementasi program P2MPP yaitu:

- 1) Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) oleh Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, yang meliputi:
 - a. Pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP).
 - b. Proses Pelaksanaan Kegiatan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP), meliputi :
 - 1). Tahap Persiapan dan sosialisasi;
(Komunikasi dan sumber daya)
 - 2). Tahap Pengelolaan Dana P2MPP;
(Sumber daya anggaran)

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP).

2.4 Hubungan Antara Ilmu Kesejahteraan Sosial Dengan Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) oleh UPKu Bina Insan Bahari, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan

Terkait dengan definisi Ilmu Kesejahteraan Sosial sebagai suatu kondisi dalam suatu masyarakat, Migley dalam Adi (2003:49) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

“A state or condition of human well-being that exists when social problems are managed, when human need are met, and when social opportunities are maximized”. (Suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dimaksimalkan). Midgley (1997:5)

Bila melihat pengertian kesejahteraan sosial yang dikemukakan oleh Migley diatas, maka Ilmu Kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai ilmu terapan yang mengkaji dan mengembangkan kerangka pemikiran serta metodologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat antara lain melalui pengelolaan masalah sosial, pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, dan pemaksimalan kesempatan anggota masyarakat untuk berkembang demi memenuhi kebutuhan manusia tersebut perlu adanya sebuah pengembangan masyarakat.

Perlu kita ketahui bahwa pengembangan masyarakat juga meliputi aspek sarana dan prasarana. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembangkan potensi di wilayah pesisir dan pantai berlandaskan budaya dan kearifan lokal. Melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan program penanggulangan kemiskinan secara profesional dan berkelanjutan sehingga dapat mengembangkan pola-pola baru yang inovatif untuk penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai

mempunyai prioritas program yang berkaitan dengan pembangunan kualitas sumberdaya manusia, khususnya dibidang perekonomian masyarakat perdesaan, dengan mengacu pada potensi dan permasalahan yang ada di wilayah pesisir dan pantai dengan mengusung prinsip pada pembangunan manusia, keberpihakan terhadap orang miskin, transparansi, partisipasi, kompetisi sehat, desentralisasi, akuntabilitas dan mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam yang lestari & berkelanjutan.

Dari penjelasan diatas diketahui letak hubungan Ilmu Kesejahteraan Sosial dengan implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) yang ada di Desa Kilensari itu terjalin. Dengan adanya program tersebut diharapkan kesejahteraan masyarakat semakin baik dan terjamin kualitas hidup masyarakat pesisir di Desa Kilensari.

2.5 Tinjauan Terhadap Penelitian Terdahulu

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu berfungsi memberikan landasan serta acuan kerangka berfikir untuk mengkaji masalah yang menjadi sasaran dari sebuah penelitian. Untuk mendapatkan informasi-informasi pendukung sebuah penelitian maka seorang penulis harus melakukan penelaahan kepustakaan yang termasuk didalamnya adalah tujuan penelitian terdahulu. Oleh karena itu, adanya tinjauan penelitian terdahulu diperlukan guna menjadi acuan penelitian yang akan dilakukan, sehingga diketahui perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian terhadap penelitian terdahulu diambil dari berbagai penelitian-penelitian, jurnal yang berhubungan dengan program pemberdayaan masyarakat pesisir. Meskipun memiliki perbedaan objek penelitian, dimensi ruang (lokasi), dimensi waktu, pembahasan dalam penelitian terdahulu tersebut dapat dijadikan rujukan berfikir secara teoritik bagi penelitian ini.

Penelitian pertama yang menarik untuk ditelusuri yakni penelitian Bahrudinnor (2007) mengenai pemberdayaan masyarakat nelayan di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian

ini mengambil fokus mengenai sumber daya manusia dan kelembagaan dalam proses pemberdayaan masyarakat nelayan. Pemberdayaan masyarakat nelayan yang dilakukan dilihat dari berbagai bentuk program representatif dalam memberdayakan nelayan melalui peningkatan sumber daya manusia dan usaha menumbuhkan wahana kelembagaan di kalangan nelayan.

Hasil penelitian Bahrudinnor tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan sumber daya manusia dilakukan dengan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat bekerjasama dengan Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) STIE Pangkalan Bun. Pemberdayaan masyarakat dilakukan pula dengan pembinaan melalui koperasi, Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), dan pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Berbagai program telah dilakukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat, meskipun hasilnya belum memuaskan. Kondisi tersebut disebabkan oleh sangat kuatnya cengkaman tengkulak dalam aktivitas ekonomi nelayan. Hal ini mengakibatkan lembaga ekonomi seperti KUD dan PPI kurang maksimal hasilnya, akibat kalah bersaing dengan tengkulak yang telah menguasai jaringan permodalan dan penjualan. Guna menetralkan peran tengkulak, berbagai program pemberdayaan yang ditujukan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan yakni pelatihan kewirausahaan. Selain itu, guna memantapkan struktur ekonomi nelayan, juga didirikan kelembagaan nelayan berupa Koperasi, Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP).

Persamaan penelitian Bahrudinnor dengan penelitian ini adalah sama-sama ingin melihat pelaksanaan berbagai program pembangunan yang disalurkan dapat berimplikasi terhadap peningkatan sumber daya dan kelembagaan nelayan. Selain itu, kesamaan kondisi struktur ekonomi dan struktur sosial dalam kaitannya dengan tengkulak, membuat penelitian ini sekiranya memiliki dasar asumsi penjelasan mengenai pentingnya melihat secara komprehensif mengenai pengaruh program terhadap kondisi sumber daya manusia dan kelembagaan. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini memfokuskan pada satu program yakni

peran Program BLM-PUMP. Selain itu, peneliti juga tertarik mengkaji aspek lain, yakni masalah infrastruktur, jaringan dan kapasitas yang semula dipengaruhi oleh relasi permodalan dan pemasaran dengan para tengkulak, tentu akan terdampak dengan adanya penetrasi Program BLM-PUMP.

Penelitian kedua yakni oleh Dimas Alif Budi (2010) mengenai implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dasar, penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini berlokasi di kota Surabaya propinsi Jawa Timur, sedangkan situs penelitian ini yaitu di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapemas KB) kota Surabaya di Kecamatan Tambaksari. Hasil dari penelitian ini yakni implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dasar di kecamatan Tambaksari terdiri dari 4 jenis utama pelatihan yaitu pelatihan makanan, handycraft, menjahit dan, aneka usaha. Adapun faktor pendukung dalam penelitian ini, yakni adanya agen pelaksana pendukung dari berbagai pihak terkait yang baik yang dilakukan secara berkala dari atas kebawah, ataupun sebaliknya. Untuk faktor penghambat yaitu kurangnya kesadaran peserta pelatihan dalam mengikuti proses pelatihan keterampilan dilihat dari masih adanya peserta pelatihan yang tidak hadir dalam pelaksanaan pelatihan dan pendampingan, juga kurangnya perhatian para peserta saat pelatihan berlangsung. Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama meneliti tentang implementasi program pemberdayaan, selain itu metode yang digunakan juga sama, yakni deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Perbedaan penelitian ini yakni lokasi penelitian, obyek penelitian dan fokus penelitian.

Penelitian ketiga yakni oleh Eko Riswanto (2011) mengenai Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan pada proyek pembangunan jembatan baja di Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang subjek penelitiannya adalah masyarakat desa Sumber Pinang, tokoh masyarakat, pelaku PNPM Mandiri pedesaan dan masyarakat yang terlibat langsung dalam proses pembangunan jembatan baja. Berdasarkan temuan yang di dapat dari lapangan, bahwa program ini dilakukan dengan pengoptimalan peran

masyarakat, masyarakat dalam hal ini dituntut untuk mandiri, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan di lapangan. Penerapan dalam program ini juga dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada di PNPM-Mandiri Perdesaan.

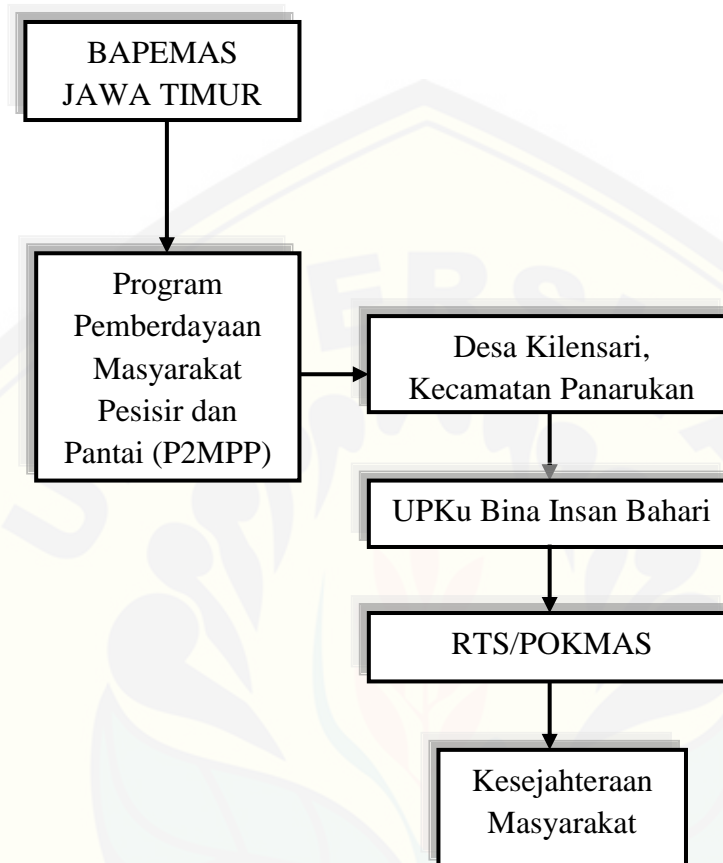
Hal ini dapat dibuktikan dengan kondisi jembatan yang melintang diatas sungai dapat difungsikan oleh masyarakat dengan baik, serta manfaat dari pembangunan jembatan baja dapat dirasakan semua masyarakat. Masyarakat tidak lagi kesulitan untuk berinteraksi dengan desa-desa lain dan tidak lagi menggunakan jalan putar untuk mengangkut hasil panen mereka (efisiensi waktu), sehingga hasil penjualan dari hasil panen mereka menjadi lebih banyak (efisiensi biaya angkut). Dengan begitu, kesejahteraan mereka menjadi lebih baik, selain itu mereka juga menjadi lebih aman saat melintasi jembatan baja ini dibandingkan dengan kondisi jembatan sebelumnya.

2.6 Alur Pikir Konsep Penelitian

Alur pikir dari konsep penelitian Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

Alur pikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Sumber : Diolah Penulis, 2016

Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur dengan program yang langsung menyentuh masyarakat di kawasan pesisir. Satu dari sekian banyak program Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur yang memberi perhatian khusus terhadap upaya pemberdayaan masyarakat pesisir pantai adalah diluncurkannya Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2010. Konsep pemberdayaan masyarakat pesisir pantai yang dimaksud dalam tulisan ini adalah upaya-upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai (P2MPP).

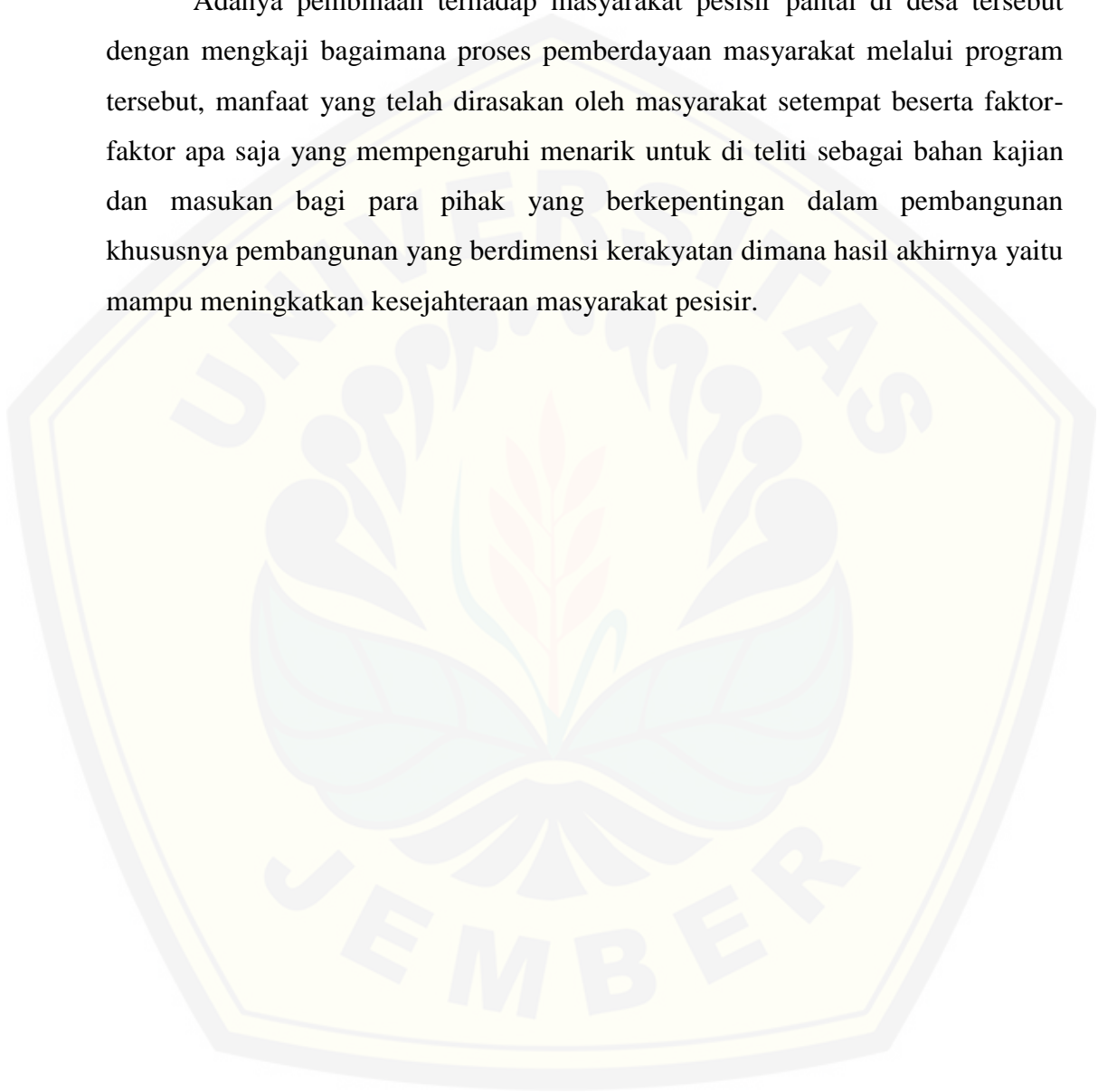
Salah satu Desa di Kabupaten Situbondo yang mendapat Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) adalah Desa Kilensari. Desa Kilensari Kecamatan Panarukan merupakan salah satu desa yang masyarakatnya sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan dan dari data yang terkumpul masih banyak masyarakat prasejahtera daripada masyarakat yang sejahtera serta adanya potensi desa Kilensari sebagai produsen ikan terbesar di wilayah Kabupaten Situbondo. Sasaran dari program P2MPP yaitu masyarakat pesisir namun, lebih difokuskan pada nelayan karena mayoritas masyarakat pesisir bermata pencaharian sebagai nelayan. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai dikelola secara terpadu dengan membuka ruang partisipasi antar stakeholders dalam rangka memfasilitasi pemberdayaan Rumah Tangga Miskin (RTM) maupun pengembangan perekonomian di wilayah pesisir dan pantai.

Wilayah pesisir Desa Kilensari mempunyai potensi sumber daya alam yang cukup beragam, diantaranya potensi perikanan tangkap, budidaya tambak, industri pengolahan ikan dan wisata pantai. wawancara oleh penulis dengan pihak yang memiliki kewenangan, yakni : a. Kepala Desa Kilensari; b. Ketua UPKu Bina Insan Bahari c. Masyarakat sasaran Program P2MPP. Salah satu pola pemberdayaan masyarakat yang selama ini dikembangkan adalah melalui pemberdayaan Unit Pengelolaan Keuangan dan Usaha (UPKu) sebagai instrumen yang memberikan pelayanan pinjaman permodalan kepada Kelompok Masyarakat Usaha Ekonomi Produktif (Pokmas UEP). UPKu dalam hal ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan permodalan baik pada kelompok maupun RTM secara perorangan yang akan memulai maupun melanjutkan usahanya dalam rangka peningkatan pendapatan (*income generating*). Dalam rangka mengoptimalkan peran UPKu sebagai instrumen pemberdayaan usaha dan peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin maka dilakukan kegiatan Pemberdayaan UPKu (www.bapemas.jatimprov.go.id).

UPKu di Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan ini bernama UPKu Bina Insan Bahari. UPKu ini berfungsi membantu aspek teknis dan manajemen dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai.

Pendampingan ini meliputi kegiatan inventarisasi potensi dan kebutuhan masyarakat pesisir dalam modal usaha, pemetaan jalur produksi, dan pasar serta kemungkinan pengembangan program melalui kerjasama dengan berbagai pihak.

Adanya pembinaan terhadap masyarakat pesisir pantai di desa tersebut dengan mengkaji bagaimana proses pemberdayaan masyarakat melalui program tersebut, manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat setempat beserta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi menarik untuk di teliti sebagai bahan kajian dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan dalam pembangunan khususnya pembangunan yang berdimensi kerakyatan dimana hasil akhirnya yaitu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.



BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam suatu penelitian ilmiah memegang peranan yang sangat penting untuk menerangkan suatu fenomena yang terjadi yang meliputi permasalahan yang ada. Dalam suatu penelitian, untuk menjelaskan suatu fenomena dibutuhkan metode penelitian. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga data tersebut dapat dirumuskan dan dianalisa yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan.

3.1 Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong 2007:6).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena membahas Implementasi program P2MPP pada UPKu Bina Insan Bahari yang harus dijelaskan secara mendalam serta naturalistik maka pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Peneliti mengamati bagaimana proses implementasi P2MPP pada UPKu Bina Insan Bahari Sehingga dapat digali tentang informasi pelaksanaan P2MPP. Informasi tersebut tentang pelaksanaan, perubahan yang dirasakan dan hambatan. Dengan pendekatan kualitatif peneliti mencari data tertulis maupun data lisan pelaksanaan P2MPP yang dilaksanakan oleh UPKu Bina Insan Bahari.

3.2 Jenis Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan memaparkan Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, jenis penelitian

yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Sugiyono (2009:230) Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan tentang Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Dalam penelitian ini data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka.

3.3 Penentuan Lokasi Penelitian

Adapun yang dimaksud dengan lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitiannya. Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo karena desa tersebut merupakan salah satu desa di wilayah pesisir Situbondo yang memperoleh Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP). Berdasarkan hasil observasi lapangan maka peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Dalam penelitian kegiatan penelitian tersebut peneliti menemukan sebuah fenomena mengenai aktifitas UPKu Bina Insan Bahari dalam program P2MPP. Pemilihan lokasi di Desa Kilensari didasari fenomena perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat setelah adanya program P2MPP selain itu ditinjau dari letak geografis yang sangat mudah diakses oleh peneliti.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Informan adalah orang yang mengetahui tentang suatu kejadian atau peristiwa di lapangan dan terlibat langsung didalam kejadian tersebut sehingga apabila peneliti bertanya pada suatu keadaan, peristiwa atau kejadian maka penelitti mendapatkan data yang valid. Penentuan informan yang tepat sangat mempengaruhi kebenaran suatu penelitian. Menurut Moleong (2000:132) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi situasi atau

kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walau hanya bersifat informal. Sebagai tim dengan kebaikannya dan dengan kesukarelaannya ia dapat memberikan pandangan dari segi orang dalam tentang nilai-nilai, sikap, proses, dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan *Teoritical Sampling* dalam menentukan informan. *Teoritical Sampling* ditunjukkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam terhadap studi yang dianalisis dan memfasilitasi pengembangan kerangka analisis dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Berikut ini teoritical sampling tentang Implementasi Program P2MPP pada UPKu Bina Insan Bahari, Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo :

Tabel 3.1 *Teoritical Sampling* Penelitian

Informasi yang digali	Informan Penelitian
Implementasi Program P2MPP pada UPKu Bina Insan Bahari	- Pengurus UPKu Bina Insan Bahari - Kepala Desa Kilensari - Pokmas/RTS

Sumber : Data Penulis

Pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini antara lain pengurus UPKu Bina Insan Bahari selaku fasilitator, Kepala Desa Kilensari selaku Pengawas, dan ketua tiap Pokmas/RTS yang berjumlah 10 Pokmas/RTS yang mendapat oinjaman modal usaha dari Program P2MPP. Dalam Sugiyono (2012:54) *Purposive* adalah tehnik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya, orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau yang akan memudahkan peneliti menjelajahi situasi sosial yang diteliti. Orang yang dianggap paling tahu tersebut dinamakan informan, dan informan tersebut adalah :

a. Informan pokok

Merupakan informan kunci dari sumber informasi yang memahami secara detail mengenai situasi sosial atau fenomena sosial yang sedang terjadi, dan informan pokok tersebut merupakan pelaku (subjek) yang terlibat didalamnya. Informan pokok ini sangat dibutuhkan oleh peneliti dalam memperoleh data yang

akurat. Dari informan pokok ini diharapkan dapat memberikan data yang akurat karena mereka merupakan orang-orang yang terlibat langsung dalam program P2MPP.

Karakteristik informan adalah ciri-ciri yang melekat pada informan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 3 orang pihak terkait yaitu kepala desa, ketua UPKu, dan bendahara UPKu Bina Insan Bahari. Berdasarkan tempat tinggal seluruh informan bertempat tinggal di desa Kilensari Kec. Panarukan. Seorang informan pokok adalah seorang yang sudah mempunyai pengalaman dalam pelaksanaan program pemberdayaan dalam jangka waktu yang lama sehingga mereka pun sangat mengerti tentang alur program dari program itu masih akan dibentuk oleh pemerintah daerah.

Ketika seorang informan pokok terlibat dalam suasana budaya, mereka menggunakan pengetahuan mereka untuk membimbing tindakannya. seorang informan pokok yang sibuk namun tertarik pada pokok bahasan, mereka seringkali meluangkan waktunya. Karena wawancara melibatkan banyak tukar pikiran maka prioritas yang tinggi adalah waktu yaitu mengkondisikan waktu pelaksanaan wawancara dengan informan pokok, karena mereka adalah orang-orang yang waktunya cukup padat untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat pesisir dan pantai. Salah satu cara penyelesaian terhadap masalah tidak cukupnya waktu adalah dengan menggunakan informan ganda.

b. Informan tambahan

Informan tambahan adalah sumber informasi yang berfungsi sebagai pelengkap dari informasi yang telah didapatkan dari informan kunci (informan pokok). Informan tambahan tersebut yaitu : Ketua dari tiap Pokmas/RTS yang berjumlah 10 Pokmas/RTS yang berpartisipasi dalam pelaksanaan program P2MPP dan sebagai orang yang mewakili serangkaian tahap peminjaman modal usaha yang dilakukan oleh tiap Pokmas/RTS. Beberapa informan menggunakan bahasa mereka untuk mendeskripsikan berbagai kejadian dan tindakan dengan cara yang hampir tanpa analisis mengenai arti atau signifikansi dari pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir dan pantai. Mereka hanya menjawab

sepengetahuan mereka tanpa ada teori pelaksanaan. Apa yang mereka alami, yang mereka rasakan maka itu yang mereka ungkapkan, Sementara ada juga informan yang memberikan analisis dan interpretasi dengan penuh pengertian mengenai berbagai kejadian itu dari perspektif “teori implementasi program pemberdayaan“. Sehingga informan pokok dan informan tambahan dapat menjadi acuan untuk menganalisis bagaimana program pemberdayaan masyarakat pesisir dan pantai yang dibentuk oleh Bapemas di desa terpilih yaitu Desa Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian terpenting dari penelitian karena hakekat penelitian adalah pencarian data yang nantinya dianalisa dan diinterpretasikan. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif diharapkan dapat menghindari data-data yang buruk sehingga akan menghasilkan data yang objektif, valid dan reliabel. Berikut ini adalah langkah-langkah teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu:

3.5.1 Observasi (Pengamatan langsung)

Observasi merupakan pengamatan pada suatu kejadian di lapangan, selanjutnya dari pengamatan tersebut dilakukan pencatatan secara sistematis terhadap gejala, data dan fakta yang diteliti secara langsung. Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa teknik observasi yang harus digunakan, (Sanafiah Faisal dalam Sugiyono, 2009:4) mengklarifikasi observasi menjadi observasi berpartisipasi (*participant observation*), observasi secara terus terang dan tersamar (*overt observation dan covert observation*), dan observasi yang tak berstruktur (*unstructured observation*). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis observasi yang secara terus terang dan tersamar (*overt observation dan covert observation*). Dalam jenis observasi ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data terkait maksud dan tujuannya dalam rangka penelitian. Akan tetapi dalam melakukan pengumpulan data, peneliti juga tidak harus berterus terang atau yang dimaksudkan adalah tidak menutup kemungkinan suatu saat peneliti melakukan

observasi dengan tersamar untuk menghindari proses penyimpanan data secara rahasia yang dilakukan oleh sumber data.

3.5.2 Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Menurut Nazir (1998:234), pengertian wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan dengan menggunakan panduan wawancara (*interview guide*). Dalam wawancara ini terdapat dua bentuk wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan cara merinci daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Dan wawancara tak terstruktur dimana informan dapat memberikan penafsiran suatu permasalahan. Kedua metode wawancara ini akan digunakan peneliti sesuai dengan kebutuhan terkait penelitian ini.

Berikut merupakan proses wawancara dan penjelasan singkat hasil wawancara dengan informan pokok dan informan tambahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Informan EF

Wawancara dengan EF selaku ketua UPKu dilakukan pada hari senin tanggal 25 Januari 2016 di kediaman ketua UPKu Bina Insan Bahari pada jam 10.30, tujuan wawancara ini adalah untuk mengumpulkan data penelitian. Situasi pada saat itu dalam dan dengan kondisi baik karena pada saat penelitian informan sedang tidak ada kegiatan baik kantor maupun dirumah, sehingga penulis dapat menanyakan dengan leluasa mengenai proses dan tahap-tahap serta kendala-kendala yang dialami selama proses Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP). Hasil wawancara kepada informan ini menjelaskan secara rinci mengenai tahapan-tahapan implementasi hingga pelaksanaannya. Wawancara ini berlangsung selama 2-3 jam.

2. Informan SR

Wawancara dengan SR selaku kepala desa dilakukan pada hari bersamaan dengan jam yang berbeda, penulis meminta bantuan kepada ketua UPKU Bina Insan Bahari untuk menghubungkan penulis dengan kepala desa melalui via telepon, dan akhirnya informan tersebut dapat ditemui di rumahnya pada pukul 16.00 WIB. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengumpulkan data mengenai keterlibatan masyarakat pada Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) serta manfaat adanya program tersebut kepada masyarakat Desa Kilensari. Wawancara yang dilakukan penulis kepada Kepala Desa kurang lebih 1 jam. Dan kepala desa sebagai informan pokok atau sebagai pengawas Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) menjelaskan dengan baik dan rinci mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penulis.

3. Informan MR

Wawancara dengan MR selaku Bendahara UPKU Bina Insan Bahari. Wawancara ini dilakukan pada hari selasa Tanggal 26 Januari 2016 pada jam 19:00 WIB di kediaman MR. Tujuan wawancara ini adalah menanyakan tentang proses peminjaman dana dan tahapan pengelolaan dana P2MPP. Wawancara ini berlangsung kurang lebih 1 jam.

4. Informan WY

Wawancara dengan WY adalah salah satu anggota dari POKMAS Calepak yang menerima bantuan dari adanya program P2MPP. Wawancara dilakukan pada tanggal 31 Januari 2016 di kediaman bapak WY pada jam 08:00. Tujuan wawancara untuk mengumpulkan data yang terkait dengan P2MPP. Dalam wawancara ini peneliti menanyakan tentang apa saja yang kendala dan manfaat dari yang diterima dari proses, kegiatan, dan hasil dari program P2MPP. Wawancara ini berlangsung selama 1 jam.

5. Informan MR

Wawancara dengan MR adalah salah satu anggota dari POKMAS Samudra. Wawancara dilakukan pada tanggal 31 Januari 2016 di kediaman MR pada jam 09:00. Pada wawancara ini peneliti menanyakan tentang apa saja yang

diketahui tentang program P2MPP. Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan data. Proses wawancara berlangsung selama 30 menit.

6. Informan IS

Wawancara dengan dengan IS adalah salah satu anggota dari POKMAS Ikan Duyung. Wawancara dilakukan dilakukan pada tanggal 31 Januari 2016 di kediaman IS pada jam 09:30. Pada wawancara ini peneliti menanyakan tentang apa saja fasilitas yang diperoleh pada saat mengikuti sosialisasi P2MPP. Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan data. Proses wawancara berlangsung selama 30 menit.

7. Informan YH

Wawancara dengan YH ketua POKMAS Ikan Gurita. Wawancara dilakukan pada tanggal 05 Februari 2016 di warung kopi dekat pelabuhan Panarukan pada jam 15.00. Pada wawancara ini peneliti ingin bertanya seputar kelompok Ikan Gurita dan apa saja yang diperoleh selama mengikuti kegiatan P2MPP. Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan data. Proses wawancara berlangsung selama 30 menit.

8. Informan AB

Wawancara dengan AB selaku ketua POKMAS Iputra Bahari. Wawancara dilakukan pada tanggal 05 Februari 2016 pada jam 19:00 di kediaman AB yang sebelum melakukan wawancara peneliti melakukan perjanjian terlebih dahulu melalui via telpon untuk bertemu pada malam hari. Pada wawancara ini peneliti menanyakan tentang alasan kenapa meminjam dana kepada UPKu dan dana yang akan digunakan itu untuk apa. Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan data. Proses wawancara berlangsung selama 30 menit.

9. Informan BR

Wawancara dengan BR selaku ketua POKMAS Kontras. Wawancara dilakukan pada tanggal 06 Februari 2016 pada jam 15:00. Wawancara dilakukan pada saat informan sedang memperbaiki kapalnya. Pada wawancara ini peneliti menanyakan manfaat yang diperoleh dari program P2MPP. Pada wawancara ini berlangsung selama 45 menit.

10. Informan DD

Wawancara dengan DD selaku ketua POKMAS Rumput Laut. Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Februari 2016 pada jam 15:00. Wawancara ini dilakukan pada saat informan sedang bersantai di depan rumahnya bersama para tetangganya. Pada wawancara ini peneliti menanyakan anggaran dana dari UPKu apakah cukup atau tidak untuk melakukan usaha dalam kelompok tersebut. Wawancara ini berlangsung kurang lebih 30 menit.

11. Informan MS

Wawancara dengan SM selaku ketua POKMAS Batu Karang. Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Februari 2016 pada jam 19:00 di kediaman MS. Pada wawancara ini peneliti bertanya seputar aktifitas POKMAS Batu Karang setelah mendapat bantuan dana dari program P2MPP. Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan data. Proses wawancara berlangsung selama 30 menit.

3.5.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Sehingga dokumentasi adalah data yang dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang luar peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sepenuhnya data asli. Data ini merupakan informasi dalam bentuk catatan-catatan resmi semisal skema dan bagan keorganisasian, peraturan-peraturan yang tertulis yakni seperti Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 104 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Pemberdayaan

Masyarakat Provinsi Jawa Timur dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ataupun arsip-arsip yang relevan dengan penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Bogdan dalam Sugiyono, 2013:244).

Senada dengan Sugiyono, Irawan (2006:76-80) mengemukakan pendapatnya bahwa ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan pada waktu melakukan analisis data penelitian kualitatif, yaitu:

a. Pengumpulan Data Mentah

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data mentah melalui wawancara, observasi lapangan, dan kajian pustaka. Pada tahap ini, peneliti menggunakan alat-alat pendukung yaitu ponsel dengan aplikasi kamera, *google map*, *voice recorder*, buku catatan lapangan dan lain-lain.

b. Transkrip Data

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan semua data mentah yang didapat selama masa observasi ataupun wawancara ke bentuk tertulis sesuai dengan apa yang peneliti lihat. Dalam penelitian ini peneliti ini bersifat netral yaitu tidak mencampur adukkan data dilapangan dengan argumentasi penulis.

c. Pembuatan Koding

Pada tahap data mentah yang telah di ubah menjadi data tertulis di pisahkan berdasarkan kata kuncinya. Kata kunci tersebut menjadi diberi kode dalam bentuk angka atau kategori yang nantinya mempermudah peneliti dalam menganalisis data.

d. Kategorisasi data

Pada tahap ini peneliti menyederhanakan data dengan cara mengikat konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam suatu dalam satu besaran yang dinamakan kategori.

e. Penyimpulan sementara

Tahap ini peneliti mengambil kesimpulan yang masih bersifat sementara dan semua berdasarkan data. Jika peneliti ingin member penafsiran peneliti sendiri maka penulis dapat menulis dibagian akhir kesimpulan sementara.

f. Triangulasi

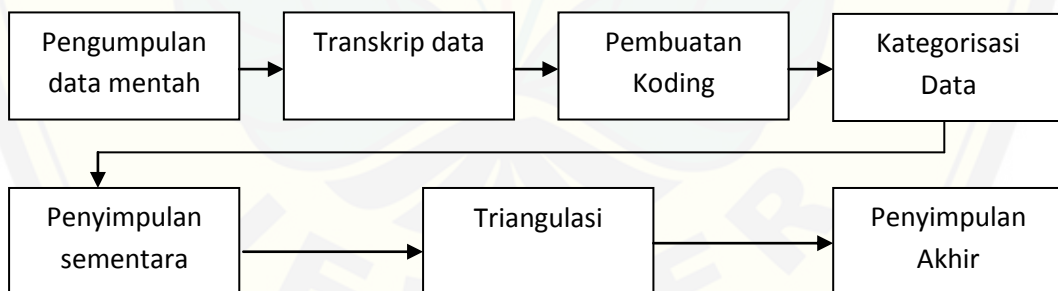
Triangulasi adalah proses *check* dan *recheck* antara satu sumber data dengan sumber data lainnya. Dalam proses ini beberapa kemungkinan bisa terjadi. Pertama, satu sumber cocok (senada, koheren) dengan sumber lain.

g. Penyimpulan Akhir

Ada kemungkinan peneliti akan mengulangi langkah satu sampai langkah enam berkali-kali, sebelum peneliti mengambil kesimpulan akhir dan mengakhiri penelitian. Kesimpulan akhir diambil ketika sudah merasa bahwa data sudah jenuh (*saturated*) dan setiap penambahan data baru hanya berarti ketimbang tindihan (*redun-dant*).

Alur proses analisis data tersebut sesuai dengan pendapat dari Irawan (2006) yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Skema Proses Analisis Data



Sumber: Irawan (2006:70)

3.7 Teknik Keabsahan Data

Di dalam sebuah penelitian data yang sudah terkumpul merupakan modal awal untuk melanjutkan penelitian ke tahap-tahap selanjutnya. Dari semua data yang terkumpul peneliti melakukan analisis data untuk bahan masukkan dan sebagai penarikan kesimpulan. Dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) oleh UPKu Bina

Insan Bahari, Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo” ini menggunakan teknik keabsahan data triangulasi. Menurut Gunawan (2013:218) triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan (kredibilitas/validitas) dan konsistensi (reliabilitas) data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data di lapangan. Triangulasi mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada dalam memperkuat tafsir dan meningkatkan kebijakan, serta program yang berbasis pada bukti yang telah tersedia. Triangulasi bukan bertujuan mencari kebenaran, tetapi meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimilikinya.

Data yang diperoleh diperiksa keabsahannya dan sebagai pembanding dengan data lain. Menurut Moleong (2008: 330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Menurut (Moleong, 2004:178), menyatakan bahwa pemeriksaan data dapat dilakukan melalui beberapa cara satu diantaranya menggunakan teknik triangulasi data yang meliputi tiga yaitu sumber, metode dan teori.

1. Menurut Patton dalam Moleong (2008:330) Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan:
 - a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
 - b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
 - c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
 - d. Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.

- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan
2. Triangulasi dengan metode, Menurut (Patton, 1987:329), terdapat dua strategi, yaitu : (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik penelitian data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
3. Triangulasi dengan teori dinamakan penjelasan banding (*rival explanation*). Dalam hal ini jika analisis telah menggunakan pola, hubungan dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis, maka penting sekali untuk mencari penjelasan pembandingan atau penyaing guna mengecek kembali kevalidan data.

Triangulasi yang digunakan terkait Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) pada UPKu Bina Insan Bahari, Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo yakni triangulasi sumber data. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengkroschekkan antara argumentasi dari penerima manfaat program P2MPP dengan fasilitator program yaitu UPKu, disini peneliti mencari kesamaan dan perbedaan argumentasi. Argumentasi dua pihak tersebut nantinya akan disamakan ulang oleh argumentasi informan tambahan. Data dapat dikatakan valid apabila argumentasi yang diucapkan semua informan sama. Argumentasi tersebut masih di croschek ulang dengan fakta dan dokumentasi dilapangan.

Peneliti fokus pada triangulasi sumber dengan alasan adanya keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian, di khawatirkan masyarakat akan mengalami dinamika yang berdampak pada perpanjangan masa penelitian. Selain itu, dengan berfokus pada satu triangulasi peneliti mampu meminimalisir perubahan atau kegagalan pada fokus kajian.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap analisis data yang diteliti seperti yang telah dikemukakan pada bagian yang terdahulu, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Melaksanakan Tahapan Persiapan

Pada tahap persiapan pelaksanaan program P2MPP oleh UPKu Bina Insan Bahari dimulai dengan menguatkan kapasitas kelembagaan UPKu agar berfungsi dan optimal sebagai pengelola program penanggulangan kemiskinan maupun lembaga pelayanan keuangan mikro di Desa Kilensari.

2. Melaksanakan Tahapan Sosialisasi oleh UPKu.

Pada tahap sosialisasi berjalan dengan baik ini dibuktikan dengan masyarakat paham dalam tahap sosialisasi yang disampaikan oleh UPKu Bina Insan Bahari. Dengan adanya sosialisasi diharapkan masyarakat mampu mengetahui tentang manfaat dari adanya Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai P2MPP (P2MPP).

3. Melaksanakan Tahapan Pengelolaan Dana

Pada tahap pengelolaan dana P2MPP meliputi segala bentuk kegiatan administratif yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi penyaluran dana yang dimulai sharing pembiayaan program hingga proporsi pembiayaan. Kemudian USP (Unit Simpan Pinjam) yang dikelola oleh UPku Bina Insan Bahari meliputi tahap pinjaman, persyaratan pinjaman, dan jenis pinjaman yang nantinya berfungsi sebagai pedoman untuk pokmas sasaran dalam peminjaman modal usaha.

4. Melaksanakan Tahapan Monitoring

Pada tahap monitoring UPKu Bina Insan bahari melakukan monitoring rutin tiap 3 bulan sekali untuk melihat berkembang pokmas setelah mendapat bantuan pinjaman dana. Selain itu monitoring juga dilakukan oleh Kepala Desa Kilensari. Monitoring tidak hanya dilakukan kepada pokmas sasaran tetapi juga

kepada pengurus UPKu. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah UPKu benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan saran-saran bagi penyempurnaan dan perbaikan program P2MPP di masa yang akan datang, sebagai berikut:

1. Dalam Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) Oleh UPKu Bina Insan Bahari pemilihan Kader UPKu hanya didasarkan pada kesepakatan bahwa Kader UPKu haruslah masyarakat setempat tanpa memperhatikan kemampuan dan keahlian yang dimiliki dalam mengelola lembaga tersebut akan berpengaruh terhadap kemampuan lembaga tersebut dalam menjalankan fungsinya.
2. Untuk tahap sosialisasi seharusnya ada upaya untuk melibatkan kalangan usahawan dan pedagang yang merupakan agen-agen perantara masyarakat pada dunia luar. Sehingga masyarakat sasaran program P2MPP dapat memanfaatkan sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang mereka miliki secara maksimal.
3. Untuk pengelolaan dana UPKu diharapkan lebih selektif dalam pemilihan RTS agar dana simpan pinjam terus berputar. Selain itu dana yang didapat oleh pokmas dirasa sangat kurang yaitu hanya 5 juta rupiah setiap kelompok. Untuk itu perlunya kajian lebih dalam tentang jumlah pemberian dana agar masyarakat dapat benar-benar merasakan manfaat dari program P2MPP.
4. Perlu adanya monitoring yang dilakukan oleh bapemas agar tetap terjaga partisipasi masyarakat dalam program P2MPP.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukur. 1987. *Kumpulan Makalah “Studi Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan. Ujung Pandang: Persadi.*
- Abdul Wahab, S. 2004. *Analisis Kebijakan : dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara.* Bumi Aksara, Jakarta.
- Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif.* Yogyakarta : Pustaka Jogja Mandiri.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, Dan Intervensi Komunitas : Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis.* Jakarta: lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Bintoro, 1991. *Mekanisasi Pelaksanaan Era Baru.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Black, dkk. 1999. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial.* Jakarta:Revika Aditama.
- Dahuri, Rokhmin. 2001. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Laut Secara Terpadu.* edisi ke-3 Penerbit PT. Paradnya Paramita , Jakarta
- Friedmann, John. 1993. *Empowerment: The Politics of Alternative Development.* Chambridge: Blackwell Publishers.
- Grindle, Marilee S., (ed), 1980, *Politics and Apolicy Implementation in the Third World,* New Jersey: Princetown University Press.
- Gunawan, I. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik.* Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Hikmat, H. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat.* Penerbit Humoniora, Bandung.
- Irawan, Prasetyo. 2006. *Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Social.*
- Kartasasmita, Ginanjar. 1995. *Pemberdayaan Masyarakat. Kumpulan Materi Community Development: Pustaka Pribadi Alizar Isna.Msi.*

- M. Nazir. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Martono, Nanang. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Parson, Wayne. 2008. *Public Policy; Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Patton, Michael Q. 1987. *Qualitative Education Methods*, Beverly Hills: Sage Publications
- Rohim, Abdur. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata*. Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Sunan Kalijaga.
- Siagian, Sondang. P. 2005. *Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soenarko, 2000. *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis* (Tri Wibowo Budi Santoso, Penerjemah). Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi Contoh Proposal Dan Laporan Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiono, 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta

Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Soetomo., 2006, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Wahjudin, Sumpeno. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh, Reinforcement Action an Development.

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.10/MEN/2002

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 104 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur

Website

https://karakteristik_masyarakat.pesisir (Diakses 15 Juni 2015)

www.bapemas.jatimprov.go.id. (Diakses 21 Juni 2015)

<https://www.situbondokab.go.id> (Diakses tanggal 17 November 2015)

Foto Kegiatan Penelitian

Gambar 1. Wawancara peneliti dengan informan EF



Gambar 2. Wawancara peneliti dengan informan SR



Gambar 4. Informan tambahan WY



Gambar 5. Sosialisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP)



Gambar 6. Kantor UPKu BINA INSAN BAHARI



Gambar 7. Pelabuhan Panarukan



PANDUAN WAWANCARA

(Interview Guide)

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PESISIR DAN PANTAI (P2MPP) GUNA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

(Studi Deskriptif pada UPKu Bina Insan Bahari, Desa Kilensari, Kecamatan
Pamarukan, Kabupaten Situbondo)

PENDAMPING/PENGAWAS PROGRAM P2MPP

INFORMAN :
TGL WAWANCARA :
NAMA :
ALAMAT :
USIA :
JENIS KELAMIN :
PENDIDIKAN :
JABATAN :

1. Siapa saja pihak-pihak yang terkait dalam Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) ?
2. Apa saja tujuan dari UPKu ?
3. Apa saja jenis pelayanan/produk pelayanan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) ?
4. Apa saja tugas pokok UPKu Bina Insan Bahari ?
5. Apa yang dimaksud RTS (Rumah Tangga Sasaran) ?
6. Bagaimana tahap-tahap Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) pada UPKu Bina Insan Bahari?

7. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) ?



PANDUAN WAWANCARA

(Interview Guide)

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PESISIR DAN PANTAI (P2MPP) GUNA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

(Studi Deskriptif Di Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten
Situbondo)

MASYARAKAT PESERTA/SASARAN PROGRAM P2MPP

INFORMAN :
TGL WAWANCARA :
NAMA :
ALAMAT :
USIA :
JENIS KELAMIN :
PENDIDIKAN :

1. Apa saja yang anda ketahui tentang UPKu Bina Insan Bahari?
2. Apa alasan anda meminjam dana yang dikelola oleh UPKu Bina Insan Bahari?
3. Apa manfaat yang anda peroleh setelah mengikuti semua program UPKu yang diadakan oleh P2MPP ?
4. Apa kendala yang anda alami pada saat peminjaman modal pinjaman dana dari UPKu Bina Insan Bahari ?

TRANSKIP REDUKSI
IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PANTAI (P2MPP)
GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Studi Deskriptif pada UPKu Bina Insan Bahari, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo)

<p>Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Deskriptif pada UPKu Bina Insan Bahari, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo)</p>		<p>Transkrip Reduksi</p>
<p>1. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) pada UPKu Bina Insan Bahari</p>	<p>1.1 Tahap Persiapan UPKu</p> <p>a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan UPKu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • “Peningkatan kapasitas kelembagaan UPKu ini dilakukan agar nantinya tujuan dari program ini kedepannya lebih baik dalam hal kepengurusan UPKu. Misalnya membenahan dasar agar nantinya kerja kami tidak terhambat karena kurang siapnya kami dalam proses

	<p>b. Peningkatan Kapasitas SDM</p> <p>c. Pengembangan Usaha UPKu</p>	<p>persiapan sebelum berlanjut ke proses sosialisasi dek.” (EF : Wawancara tanggal 25 Januari 2016)</p> <ul style="list-style-type: none">• “Memang peningkatan kapasitas kelembagaan ini dilaksanakan secara rutin agar tidak terjadi kesalahan maupun kendala dalam pelaksanaan program ini mas.”(MR : Wawancara tanggal 28 Januari 2016)• “Tahap-tahap awal yang dilakukan sebelum sosialisasi dek yaitu meningkatkan kemampuan UPKu terlebih yaitu dengan melatih pengurus UPKu agar paham tujuan program ini, bagaimana cara UPKu bekerja, membuat ide-ide baru, maupun terampil untuk masyarakat pesisir di Kilensari agar lebih berkembang.” (SR : Wawancara tanggal 01 Februari2016)• “Pengurus UPKu disini merupakan orang-orang yang punya pengalaman jadi menurut saya tidak ada masalah jika mereka dipilih untuk menjadi pengurus UPKu.
--	---	--

	<p>d. Pengembangan Sarana Prasarana UPKu</p>	<p>Terlebih bapak EF merupakan Lulusan di perguruan tinggi di Malang.” (SR : Wawancara 03 Februari 2016)</p> <ul style="list-style-type: none">• “Untuk sarana dan prasarana UPKu pihak kantor desa sudah menyediakan kantor sendiri untuk UPKu Bina Insan Bahari yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan penunjang UPKu dek.” (SR : Wawancara tanggal 05 Februari 2016)• “Dalam melaksanakan kegiatan ini bapak kepala desa sudah menyiapkan tempat untuk aktifitas kegiatan UPKu di Desa Kilensari, dengan tersedianya tempat ini diharapkan memudahkan masyarakat untuk meminjam dana.” (MR : Wawancara tanggal 05 Februari 2016)
--	--	---

	<p>1.2 Tahapan Sosialisasi oleh UPKu</p>	<ul style="list-style-type: none">• “Pada tahap sosialisasi terlebih dahulu mempertemukan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program P2MPP yaitu Pengurus UPKu, Kepala Desa selaku Pengawas, dan rumah tangga sasaran melalui musyawarah desa yang dilakukan di Balai Desa Kilensari.” (EF : Wawancara tanggal 16 Februari 2016)• “Sebelum dana turun terlebih dahulu dilakukan mudes antara pihak desa, Ketua UPKu, dan masyarakat sini yang layak menerima pinjaman dari program P2MPP nak.” (SR : Wawancara tanggal 12 Februari 2016)• “Selaku ketua UPKu saya tidak serta merta langsung memutuskan siapa yang berhak mendapat pinjaman dana dek, tapi juga harus ada masukan dari Bapak Kepala Desa dan tokoh masyarakat sini melalui mudes dek, agar nantinya tidak ada kecemburuan sosial karena ini keputusan bersama bukan perseorangan.” (EF : Wawancara tanggal 16 Februari 2016)• “Dalam proses sosialisasi salah satu tujuan utama dalam
--	--	---

		<p>pengenalan UPKu dan Program P2MPP adalah terlebih dulu terbentuk pokmas-pokmas sasaran. Hal ini dikarenakan yang dari pusat gak mau mencairkan dana jika tidak terbentuk pokmas-pokmas di desa ini.” (EF : Wawancara tanggal 16 Februari 2016)</p> <ul style="list-style-type: none">• “Memang benar, pada tahap sosialisasi harus dibentuk pokmas terlebih dahulu agar dana dari program P2MPP bisa segera cair dan dapat dimanfaatkan oleh pokmas-pokmas tersebut.” (SR : Wawancara tanggal 16 Februari 2016)• “Dalam tahap sosialisasi berjalan dengan baik ini dibuktikan dengan lancarnya proses pengenalan program P2MPP kepada masyarakat di Kilensari.” (EF : Wawancara Tanggal 16 Februari 2016)• “Semuanya berjalan dengan baik dikarenakan dalam penyampaian program P2MPP masyarakat memahami dengan baik dan tidak terkendala masalah bahasa sama sekali.” (SR : Wawancara tanggal 16 Februari 2016)
--	--	--

	<p>1.3 Tahap Pengelolaan Dana Oleh UPKu a. Penyaluran Dana P2MPP</p>	<ul style="list-style-type: none">• Penyaluran dana yang diberikan oleh Pemerintah provinsi harus melalui pemerintah daerah nanti baru dibicarakan kalau desa Kilensari membutuhkan berapa dana untuk penyediaan pengurus UPKu dan untuk dana simpan pinjam kegiatan Pokmas/RTM, biasanya prosesnya tidak lama tapi kita sulit menentukan kapan bisa sharing dan bertemu sedangkan dana harus cepat disalurkan sedangkan pemerintah masih banyak kesibukan ditempat lain juga.” (SR : 19 Februari 2016)• “Penyaluran dana P2MPP saya terima langsung dari pemerintah kabupaten, yang kemudian dana itu langsung saya masukkan rekening khusus untuk UPKu Bina Insan Bahari.” (EF : Wawancara tanggal 17 Februari 2016)• “Yang menjadi prinsip utama dalam proses penyaluran dan pencairan dana P2MPP dari UPKu kepada RTS/POKMAS yakni bahwa dana P2MPP
--	--	---

		<p>disalurkan apabila RTS/POKMAS telah siap dan mampu melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Oleh karena itu upaya untuk memperoleh dana P2MPP yang dikelola UPKu hanya dapat dilakukan apabila RTS/POKMAS telah melakukan serangkaian kegiatan penguatan kapasitas, serta mengajukan usulan kegiatan dan usulan tersebut dinyatakan layak.” (EF : Wawancara tanggal 17 Februari 2016)</p> <ul style="list-style-type: none">• “Penyaluran dana yang diberikan oleh Pemerintah provinsi harus melalui pemerintah daerah nanti baru dibicarakan kalau desa Kilensari membutuhkan berapa dana untuk penyediaan pengurus UPKu dan untuk dana simpan pinjam kegiatan Pokmas/RTM, biasanya prosesnya tidak lama tapi kita sulit menentukan kapan bisa sharing dan bertemu sedangkan dana harus cepat disalurkan sedangkan pemerintah masih banyak
--	--	---

	<p>b. Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam (USP)</p>	<p>kesibukan ditempat lain juga.” (SR : Wawancara tanggal 19 Februari 2016</p> <ul style="list-style-type: none">• “Dalam hal proporsi dana ini dek, sudah ada aturannya misal berapa persen untuk masyarakat sasaran program dan berapa persen untuk penguatan kelembagaan UPKu Bina Insan Bahari” (MR : Wawancara tanggal 03 Maret 2016)• “Memang anggaran tersebut sudah ditetapkan dari pusat seperti itu jadi yang di desa yaitu UPKu tinggal menjalankan untuk menjalankan berbagai kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh masyarakat sasaran” (SR : Wawancara tanggal 04 Maret 2016)• “Kalo waktu peminjaman tiap pokmas mendapat bantuan sebesar 5 juta rupiah mas, dana itu diberikan sesuai dengan kesepakatan bersama dan UPKu hanya memberikan kepercayaan kepada pokmas agar pinjaman dikembalikan sesuai tenggat waktu agar dana ini akan
--	---	--

		<p>terus bergulir ke pokmas atau RTS yang nantinya membutuhkan peminjaman tersebut dan agar pula tidak ada kendala dan akan terus berjalan sesuai yang diharapkan” (EF : Wawancara tanggal 01 Maret 2016)</p> <ul style="list-style-type: none">• “Dalam proses proses peminjaman saya selaku Kepala Desa hanya mengawasi kegiatan peminjaman dana ini, kadang juga ada masyarakat yang menganggap bantuan ini cuma-cuma. Jadi terkadang saya membantu UPKu untuk menegaskan kepada pokmas atau RTS agar bila meminjam harus menaati aturan yang ada agar nantinya dana tidak macet ditengah jalan dan dapat terus bergulir ke yang lain dek” (SR : Wawancara tanggal 2 Maret 2016)• “Sebelum dana ini turun pokmas harus terlebih dulu memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan agar nantinya ada kejelasan untuk apa dana tersebut dibutuhkan” (EF : Wawancara tanggal 21 Februari 2016)
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none">• “Dengan pemenuhan persyaratan terlebih dahulu, saya selaku bendahara bisa merinci dana yang akan diberikan dan dapat menyetujui proses persyaratan tersebut” (MR : Wawancara tanggal 25 Februari 2016)• “Kami dapat arahan dan ilmu dari Pak Erfan dan Surahwi untuk membuat usaha kerupuk ikan dek. Walaupun modalnya menurut saya kurang tapi setidaknya dapat membantu.” (BR : Wawancara tanggal 06 Februari 2016)• “Modal pinjaman dana ini dek kami gunakan untuk membuat sovenir dari kulit kerang. Daripada kulit kerang dibuang ya mending kami buat sovenir itung-itung untuk menambah pemasukan dek. Hahaha.” (MS : Wawancara tanggal 10 Februari 2016)
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none">• “Kelompok saya meminjam untuk keperluan perbaikan kapal dek, ya buat beli onderdil mesin, beli solar, dan makanan untuk kebutuhan melaut beberapa hari.” (WY : Wawancara tanggal 31 Januari 2016)• “Pokmas Ikan Gurita meminjam untuk keperluan memperbaiki alat menangkap ikan. Ya buat memperbaiki jala, memperbaiki genset juga dek.” (YH : Wawancara tanggal 10 Februari 2016)• “Saya minjam ya buat nambah modal jualan ikan dipasar bersama ibuk-ibuk lain yang ada dalam pokmas Ikan Duyung nak.” (Wawancara tanggal 31 Januari 2016)• “Kami pinjam ya buat budidaya rumput laut dek. budidaya ini dari usulan Ketua UPKu dek.” (DD : Wawancara tanggal 05 Februari 2016)
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none">• “Kami dapat pinjaman dana untuk ternak kambing mas. Walaupun sebelumnya belum pernah ternak kambing tapi kami sudah dapat masukan dari Kepala Desa tentang bagaimana cara perawatan kambing mas.” (AB : Wawancara tanggal 05 Februari 2016)• “Di Pokmas Samudra ini mas saya meminjam dana dari P2MPP untuk usaha sablon. Usaha sablon ini sebenarnya sudah berjalan kurang lebih 1 tahun. Tapi saya meminjam buat menambah modal saja agar tambah lengkap alat-alat sablonnya mas.” (MR: Wawancara tanggal 31 Januari 2016)• “UPKu menyediakan dana maksimal sebesar 5 juta rupiah mas. Dan nantinya dana tersebut digunakan untuk beberapa sektor usaha. Biasanya pokmas meminjam untuk perbaikan kapal mereka, ada juga yang untuk budidaya rumput laut, untuk jual ikan, ada juga yang untuk usaha sablon, dan lain-lain”. (EF : Wawancara 21
--	--	---

	1.4 Tahap Monitoring	<p>Februari 2016)</p> <ul style="list-style-type: none">• “Bantuan yang diberikan pemerintah adalah bantuan yang dikhususkan untuk masyarakat miskin. jadi menurut saya itu bukan suatu pinjaman. masak iya tetangga saya dapat bantuan secara cuma-cuma, terus bantuan yang diberikan kepada saya termasuk pinjaman. Iya saya dak mau bayar la.” (AB : Wawancara 23 Februari 2016)• “Bukannya kami tidak mau bayar dek. Cuman klo cuaca lagi buruk dan otomatis kami gak melaut kan pasti gak ada pemasukan. Mau bayar pake apa dek sedangkan kebutuhan kami misal untuk sekolah anak juga banyak.” (WY : Wawancara tanggal 10 Februari 2016)• “Pengurus UPKu melakukan monitoring secara rutin setiap 3 bulan sekali. Monitoring ini dilakukan agar bisa melihat bagaimana berkembang pokmas setelah
--	----------------------	--

		<p>mendapat bantuan pinjaman dana P2MPP.” (EF : Wawancara 09 Maret 2016)</p> <ul style="list-style-type: none">• “Monitoring ini dilaksanakan atas usulan dari Bapak Kepala Desa Kilensari, yang menyuruh kami melakukan monitoring kepada pokmas sasaran setiap 3 bulan sekali. Tak hanya pengurus UPKu terkadang Kepala Desa Kilensari juga membantu memonitoring tiap pokmas-pokmas.” (MR : Wawancara tanggal 09 Maret 2016)• “Saya selaku Kepala Desa yang ditugaskan sebagai pengawas juga berhak melakukan monitoring. Monitoring tak hanya saya lakukan kepada masyarakat tapi juga pada UPKu.” (SR : Wawancara tanggal 10 Maret 2016)• “Seharusnya ada juga pengawasan rutin dari pihak bapemas. Biar bapemas benar-benar tahu keadaan masyarakat Kilensari setelah adanya program P2MPP.” (SR : Wawancara tanggal 10 Maret 2016)
--	--	---



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember Telp. 0331-337818, 339385 Fax. 0331-337818
 e-Mail : penelitian.lemlit@unej.ac.id

Nomor : **74** /UN25.3.1/LT/2016 19 Januari 2016
 Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

Yth. Kepala
 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
 Perlindungan Masyarakat
 Pemerintah Kabupaten Situbondo
 di -
SITUBONDO

Memperhatikan surat pengantar dari Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 129/UN25.1.2/LT/2016 tanggal 14 Januari 2016, perihal permohonan ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : Opan Priya Utama/100910301047
 Fakultas / Jurusan : FISIP/Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Jember
 Alamat / HP : Jl. Karimata Jember/Hp. 081255679746
 Judul Penelitian : Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Deskriptif di Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo)
 Lokasi Penelitian : Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo
 Lama Penelitian : Dua bulan (19 Januari 2016 – 19 Maret 2016)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk mencari data sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.



Dr. Zamuri, M.Si
 NIP 196403251989021001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dekan FISIP
Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



CERTIFICATE NO : QMS.173



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. A. YANI NOMOR 68 TELP. (0338) 671 927

Situbondo, 28 Januari 2016

Nomor : 070/22/431.302.2/2016
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **REKOMENDASI**

Kepada :
Yth. Sdr. Camat Panarukan
Kabupaten Situbondo
di -
SITUBONDO

Menunjuk surat Sekretaris Lembaga Penelitian Universitas Jember, tanggal 19 Januari 2016 Nomor : 74/UN25.3.1/LT/2016 Perihal Permohonan Izin Penelitian, bersama ini terlampir disampaikan dengan hormat Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo tanggal 28 Januari 2016 Nomor : 070/22/431.302.2/2016 atas nama **OPAN PRIYA UTAMA**, dengan Judul "Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Deskriptif di Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo)", untuk mendapatkan tindak lanjut dari instansi tujuan dan memantau kegiatan peneliti.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

An. KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SITUBONDO
SEKRETARIS

ub.

Kepala Bidang HAL


Drs. H. AHMAD MUNIR, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19590314 198503 1 014





**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JL. A. YANI NOMOR 68 TELP. (0338) 671 927
SITUBONDO 68311

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN

Nomor : 070/22/431.302.2/2016

- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2011;
2. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
- Menimbang** : Sekretaris Lembaga Penelitian Universitas Jember, tanggal 19 Januari 2016 Nomor : 74/UN25.3.1/LT/2016 Perihal Permohonan Izin Penelitian, atas nama **OPAN PRIYA UTAMA**.

Bupati Situbondo, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : **OPAN PRIYA UTAMA**
b. Alamat/ HP. : Sumberluhur RT. 004 RW. 001 Kelurahan Tegaldlimo
Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi/087757922427
c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
d. Instansi/Organisasi : Universitas Jember
e. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian / survey / kegiatan dengan :

- a. Tujuan : Pengumpulan Data
b. Bidang Penelitian : Sosial
c. Penanggung Jawab : Drs. Syech Hariyono, M. Si
d. Anggota/Peserta : -
e. Waktu Penelitian : 28 Januari s/d 19 Maret 2016
f. Lokasi Penelitian : Desa Kilensari Kec. Panarukan Kab.Situbondo

Dengan ketentuan

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi penelitian/survey/kegiatan;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Situbondo melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo dalam kesempatan pertama.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

An. KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SITUBONDO
SEKRETARIS

ub.

Kepala Bidang HAL



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Sekretaris Lembaga Penelitian Universitas Jember;



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN PANARUKAN
DESA KILENSARI
Jl.Raya Panarukan No.07 Panarukan 68351

SURAT KETERANGAN

Nomor : 4701/B3/431.508.9.3/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Surahwi
NIP : 1960011320070011001
Pangkat/Gol : Pengatur
Jabatan : PJ. Kepala Desa Kilensari

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Opan Priya Utama
Alamat : Sumberluhur rt/rw 004/001, Kec.Tegaldimo, Kab. Banyuwangi
Status : Mahasiswa Universitas Jember, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial

telah selesai melaksanakan penelitian/survey/kegiatan di Desa Kilensari, Kabupaten Situbondo yang dilaksanakan sejak tanggal 19 Januari 2016 s/d 19 Maret 2016 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pantai (P2MPP) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Deskriptif Di Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo)".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kilensari, 19 Maret 2016

Yang membuat keterangan,
PJ. KEPALA DESA KILENSARI


SURAHWI

Pengatur

NIP. 1960011320070011001